

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH,
DANA PERIMBANGAN DAN PENANAMAN MODAL
SWASTA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
KABUPATEN/KOTA DI ERA OTONOMI DAERAH
DAN DESENTRALISASI FISKAL**

TESIS

**FAKIH USMAN
0606012440**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
JAKARTA
JANUARI 2009**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH,
DANA PERIMBANGAN DAN PENANAMAN MODAL
SWASTA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
KABUPATEN/KOTA DI ERA OTONOMI DAERAH
DAN DESENTRALISASI FISKAL**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi

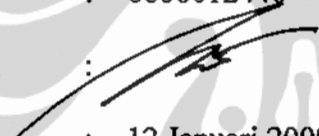
**FAKIH USMAN
0606012440**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
JAKARTA
JANUARI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Fakhri Usman
NPM : 0606012440
Tanda Tangan : 
Tanggal : 12 Januari 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Fakhri Usman
NPM : 0606012440
Program Studi : Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul Tesis : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Penanaman Modal Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Era Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Niniek L Gyatt, M.Sc (.....)
Penguji : Iman Rozani, SE. M.Soc.Sc (.....)
Penguji : Widyanti Soetjipto, SE. MA (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Januari 2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Master Ekonomi pada Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

- (1.) Ibu Niniek L Gyatt, M.Sc, selaku dosen pembimbing yang dengan sabar dan penuh perhatian telah berkenan menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan dalam penyusunan tesis ini ;
- (2.) Pak Iman Rozani, SE M.Soc.Sc dan Ibu Widyanti Soetjipto, SE. MA yang telah banyak memberikan masukan demi perbaikan tesis ini ;
- (3.) Para dosen yang telah banyak memberikan wawasan baru dan para staf akademik MPKP yang selalu memberikan pelayanan terbaiknya untuk kelancaran pelaksanaan perkuliahan hingga penyelesaian tesis ;
- (4.) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan (DJPK), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) dan pihak-pihak lain yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang diperlukan ;
- (5.) Bapak (Alm) dan Ibu H.Moh Amin Karim, orang tuaku tercinta yang tiada kenal lelah selalu berdoa dan memberikan dukungan semangat demi keberhasilan anaknya, meskipun kemudian tidak sempat melihat anaknya lulus dari MPKP-FEUI ;
- (6.) Arie Prawati, Fakhri dan Fathiya, istri dan anak-anaku tercinta yang telah banyak berkorban dan selalu memberikan dukungan moral baik langsung maupun dalam do'a khusuknya ;
- (7.) Pak Drs. Wahyu Hartomo, M.Sc dan Ibu Dra Sally Astuty Wardhani, M.Si, dan Pak Drs. Aman Santoso mantan Kepala Biro Umum & Humas dan Mantan

Kepala Bagian Keuangan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan yang telah banyak memberikan dukungan moral dan khususnya material ;

- (8.) Suharno,SE.ME sahabat baik yang telah banyak membantu dalam pengolahan data, memberikan saran dan masukan untuk tesis ini ;
- (9.) Rekan-rekan Bagian Keuangan dan Bagian Penerbit SPM Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan rekan-rekan MPKP angkatan XV A sore. Terimakasih atas bantuan dan dukungannya

Akhir kata, saya berharap semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.



Jakarta, 12 Januari 2009

Fakih Usman

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fakih Usman
NPM : 0606012440
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Penanaman Modal Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Era Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Januari 2009

Yang menyatakan



Fakih Usman

ABSTRAKSI

Nama : Fakhri Usman
Program Studi : Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Penanaman Modal Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Era Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan penanaman modal swasta terhadap pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Selain itu penelitian ini juga untuk mengetahui perbedaan karakteristik daerah berdasarkan letak geografis dan status administrasi. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder dan metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan inferensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, Dana Perimbangan dan penanaman modal swasta mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota serta terdapat perbedaan karakteristik daerah antara kabupaten/kota di propinsi Jawa-Bali dengan di luar propinsi Jawa-Bali dan antara kabupaten dengan kota.

Kata kunci :

Desentralisasi, PAD, Dana Perimbangan, Penanaman Modal Swasta, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota

The Influence of Own Revenues, Balance Funds and Private Capital Investment on Economic Regency/Town Growth in Decentralization Era.

The research is investigated a favourable influence of own revenues, balance funds and private capital investment on economic regency/town growth in decentralization era and as well as to recognize the difference of district characterization based on geographies and administration status. The study was mainly based on secondary data and was analysed by descriptive and inferential statistical. The results showed that own revenues, balance funds and private capital investment have significantly correlated with economic regency/town growth. Data analysis also revealed that seem differential characteristic area between regency/town in Java-Bali province compare between regency/town outer parts of Java-Bali province.

Key word :

Decentralization, own revenues, balance fund , private capital investment, Economic regency/town Growth

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAKSI	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL/GRAFIK	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.4 Metodologi Penelitian	6
1.5 Hipotesis	8
1.6 Kerangka Berpikir	9
1.7 Sistematika Pembahasan	10
2 Tinjauan Pustaka	11
2.1 Pengertian Desentralisasi	11
2.2 Kerangka Konseptual Desentralisasi Fiskal	14
2.3 Pengalaman Desentralisasi Fiskal Negara Lain	17
2.4 Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia	20
2.4.1 PAD di Era Desentralisasi	22
2.4.2 Dana Perimbangan di Era Desentralisasi.....	25
2.5 Pertumbuhan Ekonomi di Era Desentralisasi Fiskal	28
2.6 Penanaman Modal Swasta dan Pertumbuhan Ekonomi	32
3 Gambaran Umum Perekonomian Daerah	34
3.1 Produk Domestik Bruto (PDRB)	35
3.2 Pendapatan Asli Daerah	38
3.3 Dana Perimbangan	43
3.3 Penanaman Modal Swasta	45
4 Analisis Model Pertumbuhan Ekonomi	50
4.1 Definisi Operasional	51
4.2 Hasil Estimasi	52
4.2 Analisis Hasil Estimasi	56
5 Kesimpulan Dan Saran	61
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran	62
Daftar Pustaka.....	74

DAFTAR TABEL/GRAFIK

Grafik 3.1	Grafik 3.1 Pertumbuhan PDRB Riil Kabupaten/Kota Periode Tahun 2002 – 2006 (tahun dasar 2000)	35
Tabel 3.1	Kabupaten/Kota dengan Rata-Rata Pertumbuhan PDRB Riil Tertinggi Periode 2002-2006 (Tahun dasar 2000)	36
Grafik 3.2	Pertumbuhan PDRB Riil Kabupaten/Kota Berdasarkan Letak Geografis Periode Tahun 2002-2006 (tahun dasar 2000)	37
Grafik 3.3	Pertumbuhan PDRB Riil Kabupaten/Kota Berdasarkan Status Administrasi Periode Tahun 2002-2006 (tahun dasar 2000)	38
Grafik 3.4	Jumlah PAD Kabupaten/Kota Periode Tahun 2002 – 2006	39
Grafik 3.5	Presentase PAD Terhadap Penerimaan APBD Kabupaten/Kota Periode Tahun 2002 – 2006	40
Grafik 3.6	Jumlah PAD Kabupaten/Kota Berdasarkan Letak Geografis Periode Tahun 2002-2006	42
Grafik 3.7	Jumlah PAD Kabupaten/Kota Berdasarkan Letak Geografis Periode Tahun 2002-2006	42
Tabel 3.2	Perbandingan DAK, DAU, DBH Periode Tahun 2002 – 2006 (miliar rupiah)	43
Tabel 3.3	Perkembangan DAK per Bidang Periode Tahun 2002 – 2006 (miliar rupiah)	44
Tabel 3.4	Rata-rata Alokasi DBH&DAK Berdasarkan Letak Geografis Periode Tahun 2002 – 2006 (juta rupiah)	45
Tabel 3.5	Rata-rata DBH&DAK Berdasarkan Status Administrasi Periode Tahun 2002 – 2006 (juta rupiah)	45
Grafik 3.8	Jumlah Penanaman Modal Swasta (PMDN dan PMA) Kabupaten Kota Tahun 2002 – 2005	46
Grafik 3.9	Jumlah Penanaman Modal Kabupaten Kota Menurut PMDN dan PMA Periode Tahun 2002-2006	48
Tabel 4.1.	Hasil Estimasi MET	52
Tabel 4.2	Nilai Intercept Kab/Kota berdasarkan Letak Geografis	54
Tabel 4.3	Kabupaten/Kota Dengan Nilai Intercept Terbesar	54
Tabel 4.4	Kabupaten/Kota Dengan Nilai Intercept Terkecil	55
Tabel 4.5	Nilai Intercept Kab/Kota berdasarkan Status Administrasi	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Nama dan Kode Kabupaten/Kota	63
Lampiran 2	Hasil estimasi dengan Metode Efek Tetap	68



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang (UU) No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (yang kemudian diubah dengan UU No.32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004), telah terjadi perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sentralistik pada masa lalu telah digantikan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang lebih mendukung demokratisasi dengan memberikan penghargaan kepada masyarakat daerah yang selama ini terabaikan, yaitu pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten/kota. Sebelum era otonomi daerah, pemerintah pusat terlalu dominan terhadap daerah. Pola pendekatan sentralistik dan seragam yang dikembangkan oleh pemerintah pusat telah mematikan inisiatif dan kreativitas daerah. Pemerintah daerah kurang diberi keleluasaan (*local discretion*) untuk menentukan kebijakan daerahnya sendiri. Kewenangan yang diberikan kepada daerah tidak disertai dengan pemberian infrastruktur yang memadai, penyiapan sumber daya manusia yang professional, dan pembiayaan yang adil. Akibatnya yang terjadi adalah bukannya kemandirian daerah tetapi justru ketergantungan daerah terhadap pusat yang semakin besar (Mardiasmo, 2003).

Kebijakan otonomi daerah pada intinya adalah memberikan kewenangan kepada daerah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan seluruh fungsi pemerintahan, kecuali kewenangan pemerintahan dalam bidang pertahanan keamanan, politik luar negeri, fiskal dan moneter, peradilan, agama, dan administrasi pemerintahan yang bersifat strategis. Pelimpahan wewenang pemerintahan tersebut dilandasi pemikiran bahwa kegiatan pembangunan dan pelayanan publik harus semakin mendekat kepada masyarakat. Pendapat ini dilandasi oleh pandangan yang menyatakan bahwa

pemerintah daerah paling tahu persis kebutuhan masyarakatnya terhadap barang publik dan pada umumnya akan terpenuhi dengan lebih baik dibandingkan bila langsung diatur oleh pemerintah pusat. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, diharapkan kesejahteraan masyarakat daerah akan meningkat (Sidik, 2002).

Salah satu indikator telah terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah dengan melihat pertumbuhan ekonomi. Untuk melihat pertumbuhan ekonomi ada beberapa ukuran yang dapat dipakai diantaranya dengan melihat pertumbuhan PDRB misalnya studi yang dilakukan oleh (Yilmaz,2000). Pertumbuhan PDRB sangat penting dan dibutuhkan, sebab tanpa pertumbuhan PDRB tidak akan terjadi peningkatan kesejahteraan, kesempatan kerja, produktifitas dan distribusi pendapatan. Masyarakat dikatakan makin sejahtera jika PDRB mengalami pertumbuhan. (Rahardja dan Manurung, 2004).

Case and Fare, 2002 menjelaskan bahwa untuk membahas faktor-faktor yang menyumbang pertumbuhan ekonomi, maka pendekatan yang dilakukan adalah melalui *fungsi produksi agregat* yaitu gambaran matematis mengenai hubungan antara masukan dan keluaran nasional atau produk domestik bruto. Secara sederhana, produk domestik bruto (Y), merupakan fungsi dari jumlah modal (K) dan jumlah tenaga kerja (L) yang tersedia dalam perekonomian. Atau dalam sebuah persamaan dapat ditulis $Y = f(K, L)$. Dengan kata lain variabel-variabel ekonomi yang berpotensi mempengaruhi pertumbuhan PDRB diantaranya adalah adanya akumulasi modal (K) dan tenaga kerja (L).

Akumulasi modal (K) meliputi semua bentuk atau jenis investasi. Investasi dapat berasal dari pemerintah maupun swasta baik secara langsung maupun tidak langsung. Investasi dari pemerintah berasal dari penerimaan daerah yang tertuang dalam APBD sedangkan investasi dari swasta berupa penanaman modal swasta baik dalam bentuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA).

Sumber-sumber pembiayaan investasi yang berasal dari pemerintah dan tertuang dalam APBD meliputi pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan khususnya dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi khusus (DAK). PAD adalah

sumber pembiayaan investasi daerah yang berasal dari pemerintah daerah bersangkutan. Dana perimbangan (DBH & DAK) adalah sumber pembiayaan investasi yang berasal dari pemerintah pusat. Sedangkan sumber pembiayaan investasi daerah yang terakhir berasal dari swasta yang meliputi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri (UU No.33 tahun 2004).

PAD merupakan sumber pembiayaan investasi daerah yang potensial. Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih banyak. Peningkatan PAD secara berkelanjutan akan berdampak pada perekonomian daerah dan pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah itu (Saragih, 2003 dan Tambunan, 2006). Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PAD yang positif kemungkinan besar akan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Keadaan yang demikian akan mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif menggali potensi daerah dalam upaya meningkatkan PAD. Pada sisi lain, daerah dianggap tidak berhasil apabila peningkatan PAD tidak diiringi dengan pertumbuhan ekonomi yang berarti. Jika hal demikian yang terjadi maka bisa diindikasikan adanya eksploitasi PAD terhadap masyarakat secara berlebihan tanpa memperhatikan produktifitas masyarakat itu sendiri. Sidik (2002) menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan PAD hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima tetapi juga diukur dengan perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dana Perimbangan sebagai sumber pembiayaan investasi yang berasal dari pemerintah pusat merupakan wujud peranan penting pemerintah pusat dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang didesentralisasikan ke pemerintah daerah kabupaten/ kota dalam bidang keuangan (Syaikhu, 2007). Pemerintah pusat melakukan transfer dana ke daerah melalui beberapa mekanisme, seperti DAU, DAK, dan dana bagi hasil (DBH). Tujuan transfer dana perimbangan adalah, antara lain, untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antardaerah, dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah. Pada umumnya pemerintah daerah memanfaatkan sebagian besar DAU untuk membiayai belanja

birokrasi, sementara sebagai sumber pembiayaan investasi, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik, pemerintah daerah mengandalkan DBH dan DAK.

PMA dan PMDN sebagai sumber pembiayaan investasi daerah yang berasal dari swasta, diharapkan mampu berperan sebagai pemicu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dengan keleluasaan kewenangan yang dimiliki, pemerintah daerah dituntut untuk lebih kreatif didalam mencari alternatif sumber pembiayaan investasi terutama yang berasal dari swasta. Dari sisi eksternal, pemerintah daerah dituntut untuk mampu menarik investasi asing agar bersama-sama swasta domestik mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menimbulkan *multiplier effect* yang besar. Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal swasta harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (UU No.25 Tahun 2007).

Tenaga kerja (L) merupakan fungsi dari jumlah penduduk (populasi) Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif. Namun demikian, untuk konteks Indonesia jumlah penduduk yang besar dan pertumbuhan yang tinggi tidak selalu menguntungkan. Apabila lapangan kerja yang tersedia tidak mampu menampung peningkatan jumlah angkatan kerja yang terus bertambah setiap tahunnya akibatnya adalah angka pengangguran akan terus meningkat. Sehingga jumlah penduduk yang besar dan pertumbuhan yang tinggi justru membebani perekonomian (Todaro, 2004).

Mengacu pada deskripsi latar belakang tersebut diatas, dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengaruh sumber-sumber pembiayaan investasi yang berasal baik dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun pihak swasta terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia pada era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, maka perlu dilakukan sebuah penelitian.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka diambil perumusan masalah sebagai berikut : Apakah PAD (yang berasal dari pemerintah daerah yang bersangkutan), dana perimbangan khususnya DBH dan DAK (yang berasal dari pemerintah pusat) dan penanaman modal swasta (yang berasal dari swasta) sebagai sumber pembiayaan investasi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi pengaruh PAD sebagai sumber pembiayaan investasi daerah yang berasal dari pemerintah daerah yang bersangkutan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota ;
2. Mengidentifikasi pengaruh dana perimbangan khususnya DBH dan DAK sebagai sumber pembiayaan investasi daerah yang berasal dari pemerintah pusat terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota ;
3. Mengidentifikasi pengaruh penanaman modal swasta sebagai sumber pembiayaan investasi daerah yang berasal dari swasta terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota ;
4. Mengetahui karakteristik perekonomian kabupaten/kota di era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan :

1. Masukan bagi pengembangan ilmu kebijakan publik dan peminat masalah-masalah perekonomian daerah, khususnya pada era otonomi daerah dan desentralisasi.

- 2 Sebagai masukan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan publik dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi daerah khususnya di era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.
- 3 Memberikan tambahan referensi bagi kalangan akademisi maupun kalangan profesional dan birokrat untuk lebih memahami persoalan-persoalan dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal

1.4 Metode Penelitian

Obyek penelitian adalah 337 kabupaten/kota di Indonesia dengan titik pengamatan dari tahun 2002 sampai dengan 2006 dipilihnya periode ini karena kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mulai diterapkan secara nasional pada tahun 2001. Untuk daerah-daerah yang mengalami pemekaran, data daerah tersebut disatukan dengan daerah induknya. Karena analisis menggunakan data 337 kabupaten/kota dan kurun waktunya adalah tahun 2002 - 2006, maka analisis ini merupakan analisis pool data (*pooling data*) atau gabungan antara data *cross section* dengan *time series*.

Jenis dan sumber data yang dipergunakan adalah jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua dan biasanya data ini sudah siap dipakai. Data sekunder didapat dari berbagai sumber baik data yang dikeluarkan pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Departemen Keuangan maupun dari sumber-sumber lainnya.

Metode pengumpulan data adalah melalui studi kepustakaan yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengkaji atau mengutip berbagai teori dan informasi atau data dari berbagai buku, dokumen serta bahan rujukan lainnya yang dapat mempresentasikan obyek penelitian dan mendukung proses pembahasan hasil penelitian

Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif dan inferensial. Analisa deskriptif adalah analisa berdasar data dalam bentuk tabel dan grafik dari indikator perekonomian daerah seperti, pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana

bagi hasil dan dana alokasi khusus, serta tingkat penanaman modal swasta. Sedangkan analisis inferensial yang digunakan adalah Metode Efek Tetap (MET), Program komputer yang digunakan untuk pengolahan data adalah *software* Eviews. Dengan menggunakan alat bantu *software* Eviews diharapkan perhitungan regresi dapat dikerjakan lebih cepat dan efisien.

Analisis hubungan antara akumulasi modal melalui berbagai investasi, tenaga kerja yang diproxy melalui Populasi dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dalam model teoritiknya dinyatakan sebagai berikut :

$$\text{PDRB} = (\text{PAD, DBHDAK, PMS, POP}) \dots\dots\dots (1.1)$$

di mana :

- PDRB = produk domestik regional bruto ;
- PAD = pendapatan asli daerah ;
- DBHDAK = dana bagi hasil dan dana alokasi khusus ;
- PMS = penanaman modal swasta ;
- POP = jumlah penduduk

Berdasarkan model teoritik (persamaan 1.1), analisis kedalam model empirik atau diterjemahkan kedalam hubungan ekonometri yang siap diuji sehingga bentuk hubungannya adalah sebagai berikut :

$$\ln \text{PDRB} = \beta_0 + \beta_1 \ln \text{PAD} + \beta_2 \ln \text{DBHDAK} + \beta_3 \ln \text{PMS} + \beta_4 \ln \text{POP} + e \dots\dots\dots(1.2)$$

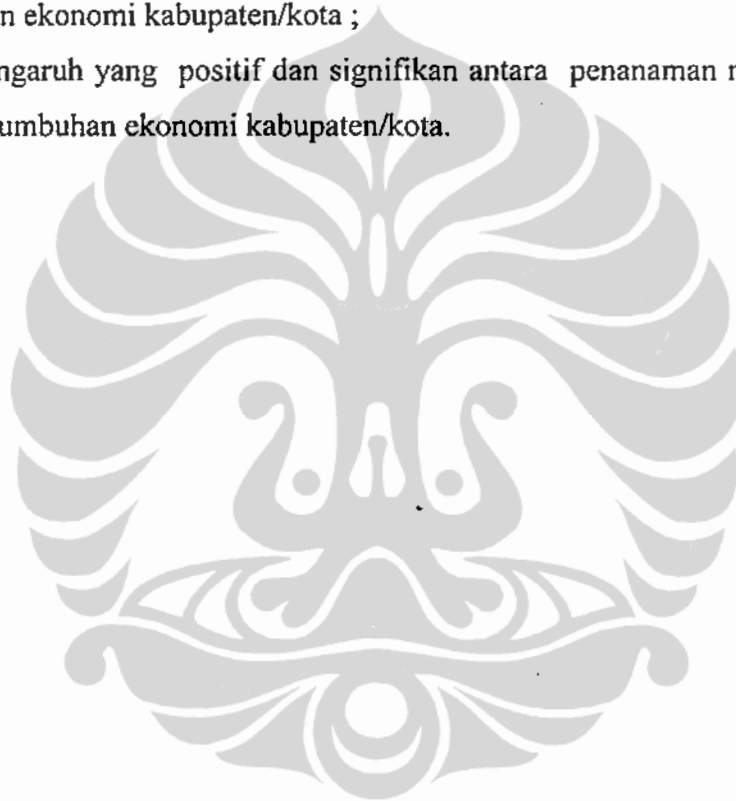
dimana :

- PDRB = produk domestik regional bruto
- PAD = pendapatan asli daerah
- DBHDAK = dana bagi hasil dan dana alokasi khusus
- PMS = penanaman modal swasta
- POP = jumlah penduduk
- € = random error

1.5 Hipotesa

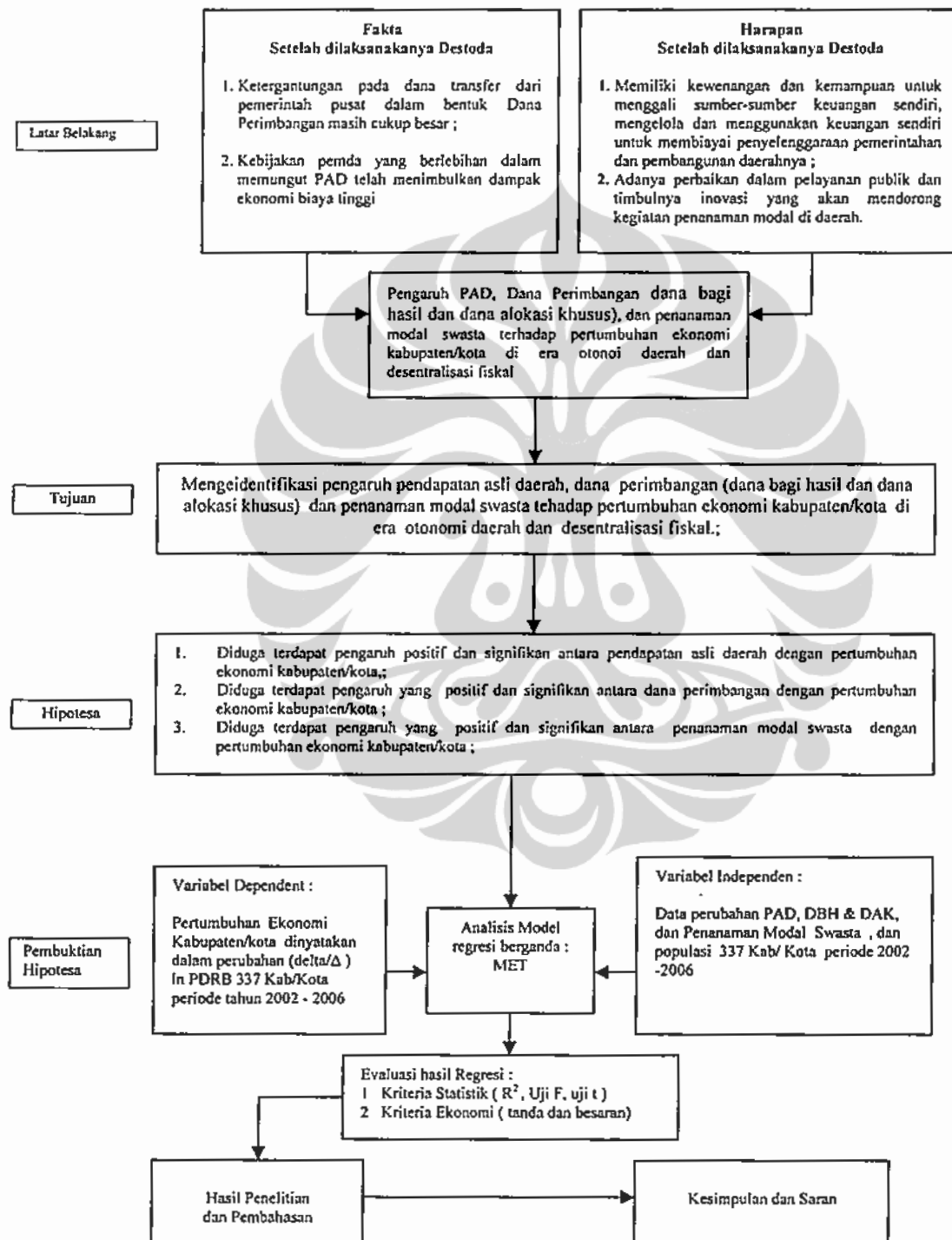
Berdasarkan pemaparan di atas, diajukan beberapa hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. Diduga terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara PAD dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota ;
2. Diduga terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara DBH dan DAK dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota ;
3. Diduga terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara penanaman modal swasta dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota.



1.6 Kerangka Berpikir

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN PENANAMAN MODAL SWASTA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI ERA OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI FISKAL



1.7 Sistematika Penulisan

- BAB 1 : Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, hipotesis penelitian, kerangka pikir dan sistematika penulisan.
- BAB 2 : Tinjauan Pustaka, bab ini menyajikan tentang tinjauan pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diamati, baik yang bersifat teori maupun hasil studi empirik. Pada bagian ini juga akan dijelaskan mengenai pengertian desentralisasi fiskal, perbandingan penerapan desentralisasi fiskal di beberapa negara, konsep desentralisasi fiskal di Indonesia, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, penanaman modal swasta dan produk domestik bruto regional
- BAB 3 : Gambaran Umum Perekonomian Daerah di Indonesia, bab ini menyajikan gambaran umum tentang perekonomian daerah menurut perbedaan wilayah administratif dan letak geografis. Disamping itu bagian ini juga menyajikan hasil analisis secara deskriptif atas data profil perekonomian tersebut.
- BAB 4 : Analisis Data, bab ini menyajikan hasil analisis dan pembahasan secara inferensial yang berupa hasil estimasi dan analisis hasil estimasi mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus dan penanaman modal swasta terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal
- BAB 5 : Penutup, bab ini berisi kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan dan saran atau rekomendasi atas kebijakan publik yang terkait dengan pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan penanaman modal swasta di era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Desentralisasi

Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Desentralisasi diwujudkan dengan pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk melakukan pembelanjaan dan memungut pajak (*tax power*), terbentuknya dewan perwakilan yang dipilih rakyat, kepala daerah yang dipilih secara demokratis, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat (Sidik, 2002).

Berbagai argumen yang mendukung desentralisasi antara lain dikemukakan oleh Tiebout (1965) dan Oates (1972) sebagaimana dikutip oleh Sidik (2002) yang menyatakan bahwa pelayanan publik yang paling efisien seharusnya diselenggarakan oleh wilayah yang memiliki kontrol geografis paling minimum, karena :

- a. Pemerintah lokal sangat menghayati kebutuhan masyarakat ;
- b. Keputusan pemerintah lokal sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga mendorong pemerintah lokal untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan dana yang berasal dari masyarakat ;
- c. Persaingan antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya akan mendorong pemerintah lokal untuk meningkatkan inovasinya.

Nilai-nilai desentralisasi dapat dibedakan berdasarkan sudut pandang kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari sudut pandang kepentingan pemerintah pusat sedikitnya ada tiga nilai desentralisasi, yaitu *pertama* untuk pendidikan politik, *kedua* untuk latihan kepemimpinan, dan *ketiga* untuk menciptakan stabilitas politik. Sementara itu dari sisi kepentingan pemerintah daerah, nilai desentralisasi adalah untuk mewujudkan keadilan politik, akuntabilitas daerah,

dan tanggungjawab daerah, Smith (1995) sebagaimana dikutip oleh Syarif Hidayat (2000).

Keberhasilan pelaksanaan desentralisasi akan sangat tergantung pada desain, proses implementasi, dukungan politis pada tingkat pengambilan keputusan di masing-masing tingkat pemerintahan dan masyarakat secara keseluruhan, kesiapan administrasi pemerintahan, pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia, mekanisme koordinasi untuk meningkatkan kinerja aparat birokrasi, perubahan sistem nilai dan perilaku birokrasi dalam memenuhi keinginan masyarakat khususnya dalam pelayanan sektor publik.

Mendefinisikan desentralisasi secara utuh memang tidaklah mudah, karena menyangkut berbagai bentuk dan dimensi yang beragam, terutama menyangkut aspek politik, perubahan administrasi dan sistem pemerintahan, sistem fiskal, dan pembangunan sosial dan ekonomi. Secara umum konsep desentralisasi terdiri dari desentralisasi politik ; desentralisasi administrasi ; desentralisasi fiskal ; dan desentralisasi ekonomi.

Desentralisasi politik bertujuan meningkatkan keikutsertaan atau partisipasi aktif masyarakat, khususnya masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan secara demokratis. Hal ini menunjukkan bahwa otoritas lokal yang dipilih harus lebih bertanggungjawab kepada masyarakat lokal yang telah memilihnya dan berusaha lebih baik dalam memperjuangkan kepentingan lokal dalam pengambilan keputusan politik.

Desentralisasi administrasi yaitu pelimpahan wewenang yang dimaksudkan untuk mendistribusikan kewenangan, tanggungjawab dan sumber-sumber keuangan untuk menyediakan pelayanan publik. Pelimpahan tanggungjawab tersebut meliputi perencanaan, pendanaan, dan pelimpahan manajemen fungsi-fungsi pemerintah dari pemerintah pusat kepada aparatnya di daerah, tingkat pemerintahan yang lebih rendah, otoritas tertentu atau perusahaan tertentu. Desentralisasi administrasi pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam 3 bentuk, yaitu :

1. Dekonsentrasi (*Deconcentration*) yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat yang berada pada garis hierarki dengan pemerintah pusat di daerah.
2. Devolusi yaitu pelimpahan wewenang kepada tingkat pemerintah yang lebih rendah dalam bidang keuangan atau tugas pemerintahan, dimana pihak pemerintah daerah mendapatkan kewenangan yang tidak dikontrol oleh pemerintah pusat. Dalam hal tertentu di mana pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu melaksanakan tugasnya, pemerintah pusat akan memberikan supervisi secara tidak langsung atas pelaksanaan tugas tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah daerah memiliki wilayah administratif yang jelas dan legal serta memberikan kewenangan sepenuhnya untuk melaksanakan fungsi publik, menggali sumber-sumber penerimaan serta mengatur penggunaannya.
3. Delegasi yaitu pelimpahan wewenang untuk tugas tertentu kepada organisasi yang berada di luar struktur birokrasi reguler yang dikontrol secara tidak langsung oleh pemerintah pusat. Pendelegasian wewenang ini biasanya diatur dengan ketentuan perundang-undangan. Pihak yang menerima wewenang mempunyai keleluasaan dalam penyelenggaraan pendelegasian tersebut, walaupun wewenang akhir tetap pada pihak pemberi wewenang.

Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah – untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik - sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan (Saragih, 2003). Desentralisasi fiskal merupakan salah satu komponen utama dari desentralisasi. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif, dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan sektor publik, maka mereka harus didukung dengan sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak, pinjaman, maupun subsidi/bantuan pemerintah pusat. Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip *money should follow function* merupakan salah satu prinsip yang harus

diperhatikan dan dilaksanakan. Artinya, setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut.

2.2 Kerangka Konseptual Desentralisasi Fiskal

Hampir setiap negara di dunia memiliki lebih dari satu jenjang pemerintahan, untuk itu perlu diatur sistem hubungan keuangan antar pemerintahan. Kebijakan sistem hubungan keuangan antar pemerintahan harus dikembangkan dengan memperhatikan kendala-kendala politis dan kendala-kendala ekonomis. Sistem hubungan keuangan antar pemerintahan pada setiap negara mencerminkan kompleksitas realitas negara yang bersangkutan. Jumlah pemerintah daerah, jumlah penduduk pada masing-masing daerah dan kapasitas ekonominya, pendapatan perkapita, sumber daya alam, seberapa besar keanekaragaman yang ada dari sisi bahasa, kelompok etnis, dan mitos kebudayaan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem hubungan keuangan antarpemerintahan (Bird, 1995).

Lebih lanjut Bird menjelaskan bahwa terdapat dua ciri utama dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di seluruh dunia, yaitu pertama berapapun jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah, jumlah penerimaan yang berada dalam kontrol pemerintah daerah hampir selalu lebih kecil dari pada jumlah pengeluarannya. Dan ciri yang kedua adalah tidak semua pemerintah daerah sama. Walaupun di negara-negara yang sangat kecil dan homogen, pasti terdapat perbedaan antara kota besar dan kota kecil, wilayah dengan tingkat urbanisasi tinggi dan kota-kota yang terpelosok.

Terdapat dua model hubungan keuangan antar pemerintahan, yaitu model *federalisme fiskal* dan model *federal finance*. Model *federalisme fiskal* menampilkan model normatif yang menggambarkan pemerintah pusat memberikan arahan dalam aturan-aturan kelembagaan antar pemerintahan untuk menjamin lembaga-lembaga pemerintah daerah bertindak sesuai dengan keinginan pemerintah pusat. Dalam model ini pemerintah daerah dianggap sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat

dan bukan pelaku otonomi. Dari pendekatan ini kerangka yang sesuai untuk penilaian desentralisasi adalah "topdown" dan berpola dekonsentrasi atau maksimalnya delegasi. Sebagian besar transfer fiskal antar pemerintahan menerapkan pola pengalokasian dana yang menggunakan formula, tetapi mewajibkan pembelanjaan dana tersebut pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan (Vailancourt,1998).

Model keuangan federal (*federal finance*) mengatur batas-batas resmi dan penyerahan fungsi-fungsi serta pembiayaan secara umum dianggap sudah diatur dalam konstitusi dan tidak terbuka peluang untuk didiskusikan lebih lanjut dalam keadaan normal. Ketika struktur federal telah disetujui secara politis sebagai perekat suatu negara, perhatian utama dalam merancang hubungan fiskal antar pemerintahan adalah seberapa jauh hal tersebut memberikan kontribusi terhadap stabilitas politik.

Lebih lanjut Vailancourt,1998 menjelaskan bahwa keterkaitan antara pemberian kewenangan untuk menyediakan jasa layanan umum untuk masyarakat dengan pemberian kewenangan memungut pajak telah melahirkan konsep utama yang menghubungkan antara desentralisasi kewenangan dengan desentralisasi sumber pembiayaan yaitu konsep "*money follow function*", yang berarti bahwa kewenangan yang diserahkan kepada daerah harus dibarengi dengan sumber pembiayaan yang sesuai dengan besarnya beban kewenangan tersebut. Dalam hal ini, maka sumber-sumber penerimaan yang sebelumnya ada di pusat sebagian harus diserahkan ke daerah. Dan dalam desentralisasi fiskal, pemungutan pajak dan retribusi adalah sumber utama pendapatan.

Disamping adanya kewenangan memungut pajak dan retribusi, juga diiringi dengan adanya transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dilakukan karena beberapa alasan ekonomi, yaitu :

1. Untuk menutupi kesenjangan fiskal, yaitu menyeimbangkan upaya penggalan penerimaan dengan tingkat pengeluaran. Penyeimbangan tersebut diperlukan dalam upaya redistribusi pendapatan atau untuk meyakinkan bahwa upaya penggalan penerimaan adalah sama, masyarakat akan menerima hasil yang sama, terlepas dimana mereka tinggal ;

2. Untuk menyediakan pelayanan-pelayanan penting pemerintahan yang minimal sesuai dengan standar minimum bagi setiap orang, sehingga memungkinkan bagi setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pelayanan-pelayanan tersebut ;
3. Untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih terkait dengan pertumbuhan dan efisiensi alokasi sumber-sumber pendapatan ;
4. Suatu cara untuk mengakui bahwa dalam beberapa sisi wilayah tertentu sebenarnya ada "hak" atas pendapatan-pendapatan tertentu , misalnya dari sumber daya alam wilayahnya yang memberikan kontribusi pendapatan.

Dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut, transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah secara eksplisit lebih condong ke tujuan-tujuan politis, seperti memungkinkannya bagi daerah yang termiskin sekalipun untuk dapat melaksanakan aktifitas penyediaan pelayanan umum dalam suatu tingkatan tertentu (Hidayat,2000).

Terdapat tiga cara dasar untuk menetapkan besaran jumlah dana yang perlu distribusikan ke daerah melalui transfer keuangan antar pemerintahan, yaitu :

1. Menurut persentase tetap dari penerimaan pemerintah pusat ;
2. Mengikuti suatu dasar *ad hoc* yaitu dengan cara yang sama seperti untuk jenis-jenis pengeluaran anggaran yang lain ;
3. Atas dasar mekanisme formula, yaitu menurut persentase dari pengeluaran-pengeluaran daerah tertentu yang dibayar oleh pusat, atau yang berhubungan dengan ciri umum daerah penerima.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal akan berjalan dengan baik apabila berpedoman pada hal-hal berikut :

- a. Adanya pemerintah pusat yang kapabel dalam melakukan pengawasan dan *enforcement* ;
- b. Terdapat keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan dalam memungut pajak dan retribusi daerah.

Kegagalan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal tidak hanya gagal dalam memperbaiki pelayanan publik, tetapi dapat juga mengganggu stabilitas nasional. Pengalaman internasional secara jelas memperlihatkan, jika suatu negara mendesentralisasikan tanggungjawab yang lebih besar dibanding dengan sumber-sumber penerimaan yang tersedia, maka tingkat pelayanan umum akan menurun, atau daerah akan menekan pusat untuk mendapatkan tambahan kucuran dana yang lebih besar atau pinjaman yang lebih besar atau kedua-duanya. Hal ini terjadi di negara-negara federasi Rusia. Sebaliknya, jika lebih banyak penerimaan daripada tanggungjawab yang didesentralisasikan, mobilisasi dana daerah dapat menurun dan ketidakseimbangan makroekonomi akan terjadi. Negara-negara Argentina, Brazil, dan Kolombia sering dijadikan contoh untuk kasus ini. Bahkan walaupun keduanya didesentralisasikan dengan pola seimbang, sering dikhawatirkan daerah tidak memiliki kapasitas administrasi dan teknis yang cukup memadai untuk menjalankan fungsi-fungsi barunya secara memuaskan. Permasalahan-permasalahan demikian mungkin perlu mendapatkan perhatian, khususnya pada negara-negara berkembang yang memerlukan investasi sosial dan infrastruktur yang penting untuk mengadakan perubahan di pemerintah daerah (Saragih 2003).

Pada akhirnya kebijakan desentralisasi fiskal merupakan kebijakan yang baik, tetapi harus dilakukan dengan benar. Desentralisasi fiskal tidak akan dapat memecahkan semua persoalan. Bahkan kadang-kadang menciptakan permasalahan baru, dan dengan pengimplementasian yang serampangan, kadang-kadang membuat permasalahan bertambah parah. Perencanaan yang baik, implementasi yang hati-hati dan upaya untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah sangat penting untuk menggapai keberhasilan.

2.3 Pengalaman Desentralisasi Fiskal Negara Lain

Beberapa ahli menyatakan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal tidak dijamin dapat diadopsi dimana saja, melainkan hanya berlaku pada negara tertentu. Hal tersebut dipengaruhi oleh latar belakang sejarah dan kebudayaannya, kondisi

kelembagaan, politik, dan ekonomi yang melekat pada negara-negara tersebut. Implementasi desentralisasi fiskal dilakukan dalam banyak format di berbagai negara. Walaupun desentralisasi fiskal diterapkan dengan format yang sama, dapat saja memberikan hasil berbeda, tergantung pada besar kecilnya perbedaan kondisi diantara negara-negara tersebut.

Hasil penelitian Bird (1995) menemukan bahwa rata-rata pemerintah daerah di negara-negara industri atau negara-negara kaya hanya membiayai 62 % pengeluarannya dari PAD, sementara pemerintah daerah di negara-negara berkembang membiayai 88 % pengeluarannya dari PAD. Sementara itu hasil penelitian Bahl dan Linn (1992) untuk 21 negara berkembang yang diteliti ditemukan bahwa rata-rata 23 % dari pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran daerah, sedangkan pada 10 negara maju, bahwa rata-rata 26 % pengeluaran pemerintah diperuntukkan bagi pengeluaran daerah. Dengan menggunakan sumber yang berbeda Bird (1995) untuk 18 negara maju, ditemukan bahwa rata-rata 22 % dari pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran daerah, dan hanya 9 % untuk negara berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, derajat desentralisasi fiskal dari sisi pengeluaran cenderung lebih besar pada negara-negara maju dibandingkan negara-negara berkembang.

Transfer keuangan antar pemerintahan sangat penting dalam menentukan pola dan tingkat pengeluaran di wilayah-wilayah yang lebih miskin di suatu negara. Di Argentina misalnya, walaupun pendapatan domestik bruto (PDB) per kapita di propinsi berpendapatan rendah hanya 39 % dari PDB per kapita propinsi yang berpendapatan tinggi, tetapi pengeluaran per-kapita propinsi yang berpendapatan rendah mencapai 130 % dari propinsi yang lebih kaya (Rezk, tanpa tahun). Di Vietnam, penerimaan perkapita propinsi berpendapatan rendah adalah 9 % dari penerimaan propinsi kaya. Walaupun demikian, dengan adanya transfer keuangan antar pemerintahan dari pusat, pengeluaran propinsi-propinsi termiskin sebesar 59 % dari propinsi-propinsi kaya.

Bahl (2002) dalam penelitiannya tentang pelaksanaan desentralisasi fiskal di Cina, menjelaskan bahwa reformasi fiskal Cina tahun 1994 ternyata tidak ditujukan

sebagai sarana untuk mendorong desentralisasi fiskal. Jika negara besar cenderung mendesentralisasikan pemerintahan mereka karena besarnya manajemen pusat yang tidak ekonomis, dan karena negara besar cenderung beraneka ragam secara teknis, juga karena negara besar memiliki variasi yang lebar diantara propinsinya dalam permintaan layanan pemerintah pusat. Negara Cina merupakan paradoks karena merupakan negara terbesar di dunia, tetapi tetap meneruskan struktur pajaknya yang sangat sentralistik.

Pengalaman di Rusia, berdasarkan penelitian Vazquez (2001) sebagaimana dikutip oleh Saragih (2003) menggambarkan bahwa pada awal pelaksanaan desentralisasi tahun 1990-an, distribusi pengeluaran dari anggaran negara Rusia untuk semua level pemerintahan daerah relatif kecil. Pemerintah pusat masih mengelola pengeluaran anggaran negara yang cukup besar. Setelah pelaksanaan desentralisasi berjalan 5 tahun, distribusi pengeluaran untuk pemerintah daerah semakin meningkat, walaupun pemerintah pusat masih juga mengelola anggaran lebih besar dibandingkan dengan yang dikelola pemerintah daerah.

Dalam analisis selanjutnya, ternyata perbandingan pengelolaan anggaran untuk sektor publik, pemerintah daerah justru mengelola anggaran lebih besar dibandingkan pemerintah pusat. Distribusi anggaran untuk sektor pendidikan, misalnya pada tahun 1992 pemerintah pusat mendapatkan dana sebesar 33,8 % dari total anggaran pendidikan nasional, sedangkan pemerintah daerah menerima 66,2 %.

Setelah 5 tahun, distribusi anggaran pemerintah pusat Rusia kepada pemerintah daerah untuk pendidikan semakin besar, yakni mencapai angka 86,8 %, sedangkan pemerintah pusat hanya mengelola 13,2 % dari total anggaran pendidikan nasional. Untuk sektor kesehatan, ditribusi anggaran anggaran kepada pemerintah daerah periode 1992 sampai 1997, mencapai rata-rata setiap tahun sebesar 88 % dari total anggaran kesehatan. Sementara pemerintah pusat hanya mengelola anggaran rata-rata 12 %.

Beberapa hasil penelitian tentang pelaksanaan desentralisasi fiskal khususnya di negara berkembang dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kelembagaan partisipasi masyarakat dan akuntabilitasnya perlu dilaksanakan reformasi dan upaya tersebut harus menyatu dengan penyediaan perangkat-perangkat yang sesuai untuk mempersempit ruang gerak para pejabat agar tidak bertindak ceroboh atau salah urus ;
2. Reformasi pegawai negeri juga penting demi suksesnya program desentralisasi. Struktur insentif pegawai negeri harus menghargai orientasi pelayanan dan kinerja ;
3. Kapasitas kelembagaan untuk membangun dan mengembangkan praktek organisasi modern, seperti sistem penganggaran, auditing, dan akuntansi hendaknya tidak dipandang sebagai kendala untuk desentralisasi pada saat partisipasi masyarakat dan transparansi pengambilan kebijakan sudah dapat dilaksanakan ;
4. Kurangnya kemampuan kelembagaan seharusnya tidak dipandang sebagai pembenaran tidak diberlakukannya desentralisasi. Harus pula dikembangkan bahwa tujuan kebijakan desentralisasi yang mengakomodir ciri dan tipe pemerintah daerah, aspek kesukuannya dan kemampuan fiskalnya ;
5. Desentralisasi yang berhasil tidak dapat dicapai tanpa keberadaan program transfer fiskal yang terancang dengan baik. Rancangan transfer harus sederhana, transparan, dan konsisten dengan tujuannya.

2.4 Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia tidak terlepas dari ditetapkannya UU No.22 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dengan ditetapkannya kedua UU tersebut telah terjadi perubahan yang sangat mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan dan dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yang dalam beberapa literatur

disebut *inter government fiscal* dan dalam UJU No.25 tahun 1999 disebut dengan perimbangan keuangan.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia telah membawa konsekwensi pada peta pengalokasian fiskal yang cukup mendasar. Peningkatan yang cukup signifikan pada transfer dana ke daerah melalui dana perimbangan telah menyebabkan pengelolaan fiskal pemerintah pusat secara umum telah berkurang. Sebaliknya pengelolaan fiskal yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah mengalami peningkatan secara tajam. Perubahan peta pengelolaan fiskal ini juga diiringi dengan kenyataan bahwa pemerintah daerah akan mempunyai fleksibilitas yang cukup tinggi dan kewenangan penuh dalam pemanfaatan sumber-sumber utama pembiayaan tersebut.(UU 33 tahun 2004)

Berdasarkan UU No.22 tahun 1999, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan seluruh fungsi pemerintahan, kecuali kewenangan pemerintahan dalam bidang pertahanan keamanan, politik luar negeri, fiskal dan moneter, peradilan, agama, dan administrasi pemerintahan yang strategis. Dengan pembagian kewenangan tersebut, pelaksanaan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonstrasi, dan asas tugas pembantuan.

Implikasi langsung dari kewenangan/fungsi yang diserahkan kepada daerah tersebut adalah kebutuhan dana yang cukup besar pada pemerintah daerah. Untuk itu perlu diatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam rangka membiayai pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangannya.

Sejalan dengan pembagian kewenangan tersebut, maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD, pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berdasarkan asas desentralisasi, kepada pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memungut

pajak/retribusi dan pemberian bagi hasil penerimaan (*revenue sharing*) serta bantuan keuangan dari pemerintah pusat yang berupa dana perimbangan. Selain itu pemerintah daerah juga diberi kewenangan untuk melakukan pinjaman baik dari dalam maupun dari luar negeri. Pinjaman tersebut dapat berupa pinjaman jangka pendek untuk membiayai kesulitan arus kas daerah dan pinjaman jangka panjang untuk membiayai

Berdasarkan pasal 5 UU No.33 tahun 2004 , bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi adalah Dana Perimbangan (rata-rata sebesar 74,6 %), PAD (rata-rata sebesar 18,2 %), dan lain-lain (rata-rata sebesar 7,2 %)

2.4.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Era Desentralisasi

Salah satu wujud pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber pendapatan bagi daerah yang digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensi masing-masing. Memang jika dikaji secara cermat, kebijakan PAD tidak berkaitan langsung dengan implementasi desentralisasi. Tanpa desentralisasi pun PAD sebenarnya merupakan andalan utama daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Namun, nilai dan peran PAD selama ini masih relatif kecil (Ismail,2003).

Banyak pakar yang menyatakan bahwa PAD kedepan mempunyai peran yang sangat strategis didalam mensukseskan kebijakan desentralisasi, persoalannya adalah bagaimana pemerintah daerah mampu mengembangkan dan mengefektifkan penggunaan PAD tanpa harus membebani masyarakat dan investor di daerah. Dalam kaitan tersebut, bisa saja pemerintah daerah memacu peningkatan PAD dengan cara membebani masyarakat dan investor dengan cara menambah jenis-jenis pajak dan

retribusi baru atau penetapan tarif yang sedikit lebih tinggi. Selama peningkatan PAD tidak memberatkan atau membebani masyarakat lokal dan investor tentu tidak masalah. Dan dapat dikatakan bahwa daerah dengan PAD yang meningkat setiap tahun mengindikasikan daerah tersebut mampu membangun secara mandiri tanpa tergantung pada pemerintah pusat. Namun sebaliknya, apabila peningkatan PAD justru berdampak terhadap perekonomian daerah yang tidak berkembang atau semakin memburuk, maka peningkatan PAD tidak dapat dikatakan sebagai keberhasilan pelaksanaan desentralisasi.

Sumber-sumber pendapatan asli daerah meliputi :

1. Pajak Daerah.
2. Retribusi Daerah.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah.

Kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah diatur dengan UU No.34 tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan atas UU No.18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No.65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP No. 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Untuk menghindari pengenaan pajak berganda maka diadakan pemisahan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah propinsi dan yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Pajak kabupaten/kota terdiri dari 7 (tujuh) jenis yaitu :

1. Pajak hotel.
2. Pajak restoran.
3. Pajak hiburan.
4. Pajak reklame.
5. Pajak penerangan jalan.
6. Pajak pengambilan bahan galian C
7. Pajak parkir.

Jenis pajak daerah kabupaten/kota tidak bersifat limitatif, artinya pemerintah kabupaten/kota masih diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya selain yang telah ditetapkan secara eksplisit dalam UU no.34 tahun 2000, dengan menetapkan sendiri jenis pajak yang bersifat spesifik dengan memperhatikan kriteria yang ditetapkan dalam UU tersebut. Kriteria yang dimaksud adalah :

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi.
2. Obyek terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
3. Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
4. Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak propinsi dan/atau obyek pajak pusat.
5. Potensinya memadai.
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
8. Menjaga kelestarian lingkungan.

Besarnya tarif yang berlaku definitif untuk pajak kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah, namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah ditentukan dalam UU tersebut.

Retribusi daerah merupakan salah satu jenis pendapatan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan pasal 18 UU No.34 tahun 2000 dijelaskan bahwa obyek atau jenis retribusi daerah terdiri dari :

1. Retribusi jasa umum.
2. Retribusi jasa usaha.
3. Retribusi perijinan tertentu.

Tarif retribusi bersifat fleksibel, artinya besarnya tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan retribusi dan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan atau mengelola jenis pelayanan publik di daerahnya. Semakin efisien pengelolaan pelayanan publik di suatu daerah, maka semakin rendah tarif retribusi yang dikenakan. Semakin banyak jenisnya dan semakin meningkat mutu pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakatnya, maka kecenderungan penerimaan PAD dari dana retribusi semakin besar.

2.4.2 Dana Perimbangan di Era Desentralisasi

Memasuki era desentralisasi pada 2001, pemerintah pusat tetap memainkan peranan penting dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang didesentralisasikan ke pemda kabupaten/kota. Dalam hal keuangan, misalnya, pemerintah pusat secara khusus bertanggung jawab menjaga keseimbangan alokasi dana antardaerah. Untuk itu, Pemerintah Pusat melakukan transfer dana (dana perimbangan) ke daerah melalui beberapa mekanisme, seperti dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH). Tujuan transfer dana perimbangan adalah, antara lain, untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antardaerah, dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah (UU No.33 tahun 2004).

Kebijakan pengalokasian DAU minimal 26 % dari penerimaan dalam negeri akan memberikan kepastian bagi daerah untuk memperoleh sumber-sumber pendapatan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya. Kebutuhan DAU oleh suatu daerah ditentukan dengan menggunakan pendekatan konsep celah fiskal, yaitu kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan berdasarkan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dengan potensi daerah (*fiscal capacity*) Dengan kata lain, DAU digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada. Berdasarkan konsep tersebut, pengalokasian DAU kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah

yang mempunyai kemampuan keuangan daerah relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar. Dengan konsep ini sebenarnya daerah yang kemampuan fiskalnya lebih besar dari kebutuhan fiskalnya hitungan DAU-nya akan negatif. Pada umumnya pemerintah daerah menggunakan sebagian besar DAU untuk membiayai belanja birokrasi.

DAK merupakan modifikasi dari model dana Inpres pada era Orde Baru yang memiliki dua pendekatan, yaitu pendekatan sektoral dan wilayah. Berbeda dengan dana Inpres, DAK hanya dialokasikan untuk kabupaten/kota dengan alokasi bidang yang bergantung pada prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam RKP (rencana kerja pemerintah) yang ditentukan dan ditetapkan setiap tahun. Bidang pembiayaan DAK bertambah sesuai dengan perkembangan RKP yang merupakan acuan rencana pembangunan nasional. Perubahan terhadap prioritas pembangunan sebagaimana tercatat dalam RKP akan mencerminkan perubahan pada bidang-bidang ke mana DAK disalurkan. Sebagai contoh, pada 2007, Pemerintah Pusat memberikan prioritas yang tinggi kepada pembangunan di bidang pendidikan, dan sebagai akibatnya, bidang ini menerima alokasi DAK terbesar. Pada tahun 2005 dan 2006, sesuai dengan prioritas pembangunan untuk tahun-tahun tersebut, pembangunan infrastruktur menerima proporsi DAK terbesar. Penetapan jumlah DAK dan alokasinya kepada daerah merupakan hasil keputusan antara panitia anggaran DPR dengan pemerintah yang terdiri dari unsur Depkeu, Depdagri, Bappenas, dan departemen teknis yang bidang tugasnya menerima alokasi DAK (PP RI No.55 tahun 2005).

Perolehan dan pemanfaatan DAK oleh daerah harus mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Meskipun DAK termasuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dalam pemanfaatannya pemda harus mengikuti berbagai regulasi pusat, seperti UU, PP, keputusan presiden, peraturan/keputusan menteri, surat edaran direktur jenderal, dan surat edaran direktur departemen.

Daerah dapat menerima DAK apabila memenuhi tiga kriteria, yaitu kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD, yaitu kemampuan

untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum dikurangi dengan belanja pegawai. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekhususan suatu daerah dan karakteristik daerah antara lain daerah pesisir dan kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah yang termasuk rawan banjir dan longsor, serta daerah yang termasuk daerah ketahanan pangan. Kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian negara/departemen teknis yang meliputi antara lain standar kualitas/ kuantitas konstruksi, serta perkiraan manfaat lokal dan nasional yang menjadi indikator dalam perhitungan teknis. Bagi daerah yang menerima alokasi DAK, daerah tersebut wajib menyediakan dana pendamping minimal sebesar 10% dari DAK yang diterimanya, dengan pengecualian bagi daerah dengan kemampuan fiskal rendah. Daerah juga diwajibkan untuk menyediakan 3% dari nilai DAK yang diterimanya untuk biaya umum dan dana ini diambil dari sumber penerimaan lainnya.

Meskipun terdapat peningkatan nilai nominal dari tahun ke tahun, nilai total DAK masih relatif rendah dalam keseluruhan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Menurut data SMERU (2007) bahwa proporsi DAK dalam total pengeluaran APBN adalah 2,2%, sementara dalam total penerimaan APBN, proporsinya adalah 2,4%.

Untuk menambah penerimaan daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangannya, dilakukan pola bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pola bagi hasil penerimaan negara tersebut dilakukan dengan persentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil (*by origin*).

Bagi hasil penerimaan tersebut meliputi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh) perseorangan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan penerimaan dari sumber daya alam (SDA) yang terdiri dari sektor kehutanan, pertambangan umum, minyak dan gas alam, dan perikanan. Pemerintah daerah mendapatkan bagian PPh perseorangan sebesar 20 % dan 80 % untuk pemerintah pusat. Penerimaan negara dari PBB dengan imbalan 10 % untuk

pemerintah pusat dan 90 % untuk pemerintah daerah. Penerimaan negara dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) akan dibagi dengan imbalan 20 % untuk pemerintah pusat dan 80 % untuk pemerintah daerah. Penerimaan pemerintah pusat dari bagi hasil PBB dan BPHTB akan dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota.

Bagian daerah yang diterima pemerintah daerah yang berasal dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi dengan imbalan 20 % untuk pemerintah pusat dan 80 % untuk pemerintah daerah.

2.5 Pertumbuhan Ekonomi di Era Desentralisasi Fiskal

Pada bagian sebelumnya telah dibahas tentang pengalaman pelaksanaan desentralisasi fiskal secara umum di beberapa negara. Pada bagian ini akan diketengahkan tentang pengalaman penerapan desentralisasi fiskal yang dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini penting untuk diketengahkan mengingat penelitian ini ingin mengetahui pengaruh PAD, dana alokasi khusus dan penanaman modal swasta terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Salah satu tujuan utama kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah mendorong peningkatan perekonomian daerah. Dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangannya, khususnya melalui PAD, dana alokasi khusus dan penanaman modal swasta.

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika jumlah produksi barang dan jasanya meningkat. Dalam dunia nyata, amat sulit untuk mencatat jumlah unit barang dan jasa yang dihasilkan selama periode tertentu. Karena itu angka yang digunakan untuk menaksir perubahan output adalah nilai moneterinya (uang) yang tercermin dalam nilai produk domestik bruto (PDB). Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, nilai PDB yang digunakan adalah nilai PDB berdasarkan harga konstan. Sebab dengan menggunakan harga konstan, pengaruh perubahan harga telah

dihilangkan sehingga sekalipun angka yang muncul adalah nilai uang dari output barang dan jasa, perubahan PDB sekaligus menunjukkan perubahan jumlah kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan selama periode tertentu (Manurung dan Rahardja, 2001).

Beberapa teori pertumbuhan ekonomi mencoba menjelaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan faktor-faktor penentu yang mempengaruhinya. Salah satu teori pertumbuhan ekonomi adalah teori pertumbuhan neo klasik. Teori ini dikembangkan oleh Solow (1956) dan merupakan penyempurnaan dari teori klasik. Fokus pembahasan teori pertumbuhan neo klasik adalah akumulasi stok barang modal dan keterkaitannya dengan keputusan masyarakat untuk melakukan investasi. Asumsi-asumsi penting dari model Solow antara lain :

1. Tingkat teknologi dianggap konstan (tidak ada kemajuan teknologi)
2. Tingkat depresiasi dianggap konstan
3. Tidak ada perdagangan luar negeri atau aliran masuk barang modal
4. Tidak ada sektor pemerintah
5. Tingkat pertumbuhan penduduk dianggap konstan
6. Untuk mempermudah analisis dapat ditambahkan asumsi bahwa seluruh penduduk bekerja sehingga jumlah penduduk sama dengan jumlah tenaga kerja.

Dengan asumsi-asumsi tersebut kita dapat mempersempit faktor-faktor penentu pertumbuhan menjadi hanya stok barang modal dan tenaga kerja. Lebih lanjut lagi, dapat diasumsikan bahwa PDB per kapita semata-mata ditentukan oleh stok barang modal per tenaga kerja. $Y = f(k)$.

Beberapa studi yang telah dilakukan mencoba untuk meneliti bagaimana desentralisasi fiskal mempengaruhi tingkat laju pertumbuhan ekonomi. Studi Davoodi, Xie dan Zou (1995) di Amerika memperlihatkan bahwa desentralisasi fiskal berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi meskipun rendah. Davoodi dan Zou (1998) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa rata-rata negara maju lebih mendesentralisasi dibanding negara berkembang dengan perbandingan 33 % untuk negara maju dan 22 % untuk negara berkembang dan kebijakan desentralisasi fiskal

mempunyai pengaruh yang positif untuk pertumbuhan ekonomi negara-negara maju dan sebaliknya terdapat hubungan yang negatif antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang. Sedangkan studi Zhang dan Zou (1996) menyimpulkan bahwa dinegeri China, kebijakan desentralisasi fiskal berhubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi regional.

Implikasi kebijakan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi memang masih banyak diperdebatkan baik dari sisi teori maupun dari sisi studi empiriknya. Secara empirik beberapa penelitian menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi daerah artinya bahwa setiap terjadi peningkatan jumlah pengeluaran pemerintah daerah akan meningkatkan pertumbuhan pendapatan perkapita.

Selain dilihat dari sisi pengeluaran, implikasi desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan dari sisi penerimaan juga penting untuk diperhatikan. Bagaimana sisi penerimaan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tersebut lebih ditujukan pada pengaruh yang tidak langsung, yaitu penerimaan yang terhimpun akan menjadi modal. Selanjutnya dengan modal tersebut, pemerintah daerah akan melakukan belanja pembangunan atau belanja modal yang pada akhirnya akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Penelitian Makmun (2004) tentang pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi daerah menggunakan pendekatan daya ungkit daerah terhadap pertumbuhan ekonomi yang diukur dari rasio APBD terhadap PDRB kabupaten dan kota. Meskipun secara teoritis dampak pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan PDRB adalah sangat kecil, namun analisis ini sangat penting untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas fiskal terhadap kinerja ekonomi daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB kabupaten/kota sebelum desentralisasi (periode 1993-1999) ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan setelah desentralisasi (periode 2001-2002). Penurunan pertumbuhan PDRB ini kemungkinan lebih disebabkan oleh pemekaran sejumlah kabupaten/kota baru yang berdampak pada penurunan pertumbuhan PDRB kabupaten/kota yang dimekarkan. Hasil lain dari penelitian ini adalah secara umum

rasio APBD terhadap PDRB kabupaten/kota sebelum dan sesudah desentralisasi fiskal menunjukkan adanya peningkatan sebesar 0.07 %. Peningkatan rasio APBD terhadap PDRB juga membawa dampak positif terhadap pertumbuhan PDRB kabupaten/kota. Dan ternyata kabupaten/kota yang rasio APBD terhadap PDRB mengalami pertumbuhan terbesar tidak selalu diikuti dengan pertumbuhan PDRB yang terbesar pula.

Penelitian Joko Waluyo (2007) tentang dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar daerah di Indonesia menggunakan model ekonometrika persamaan simultan dengan data panel antar propinsi atas dasar harga konstan 2003. Hasil yang didapat dari penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berdampak meningkatkan pertumbuhan ekonomi relatif lebih tinggi di daerah pusat bisnis dan daerah yang kaya sumber daya alam daripada daerah yang bukan pusat bisnis dan miskin sumber daya alam. Mekanisme transfer dana perimbangan berdasarkan UU No.33 tahun 2004, ternyata lebih menguntungkan bagi daerah yang kaya sumberdaya alam melalui bagihasil sumber daya alam. Disamping itu desentralisasi fiskal akan berdampak mengurangi ketimpangan pendapatan antar daerah terutama antara daerah di pulau Jawa dan daerah di luar pulau Jawa. Hal ini disebabkan karena mekanisme transfer melalui dana perimbangan akan mengurangi pembangunan yang bersifat jawa sentris.

Dewi Pusporini (2006) dalam penelitian tentang Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah menggunakan metode analisis deskriptif dan inferensial. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah terdapat hubungan yang positif antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara signifikan memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi daerah, meskipun pengaruhnya sangat kecil. Lebih lanjut Dewi menyimpulkan bahwa pertumbuhan daerah perkotaan lebih tinggi daripada kabupaten dan pertumbuhan wilayah Jawa-Bali lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah luar Jawa-bali.

2.6. Penanaman Modal Swasta dan Pertumbuhan Ekonomi

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa salah satu komponen utama peningkatan perekonomian di setiap negara adalah adanya akumulasi modal. Akumulasi modal terjadi apabila sebagian pendapatan di tabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan dikemudian hari. Pengalaman beberapa negara maju terbukti bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi adalah besarnya barang modal dan kualitas sumber daya manusia. Karena itu jika sebuah perekonomian ingin maju, perekonomian tersebut harus melakukan investasi (Mandala, 2001).

Investasi dapat dibedakan antara investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung adalah investasi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan stok modal misalnya pengadaan pabrik baru, mesin, dan bahan baku. Investasi tidak langsung atau biasa disebut investasi infrastruktur yaitu investasi penunjang sarana untuk meningkatkan produktivitas, misalnya pembangunan jalan, penyediaan listrik, air bersih dan sebagainya (Todaro 2004).

Investasi modal total oleh sektor swasta disebut dengan investasi swasta bruto. Investasi swasta bruto terdiri dari *pertama* investasi non residensial yaitu pengeluaran perusahaan untuk memperoleh mesin, peralatan pabrik, dan sebagainya. *Kedua* investasi residensial yaitu pengeluaran oleh rumah tangga dan perusahaan untuk rumah dan bangunan apartemen baru. *Ketiga* perubahan persediaan bisnis yaitu jumlah perubahan persediaan perusahaan selama satu periode tertentu.

Disamping sektor swasta, investasi juga dilakukan oleh pemerintah. Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dihitung sebagai konsumsi pemerintah dan sebagian yang lain dihitung sebagai investasi bruto pemerintah (Case & Fare 2004).

Dalam konteks Indonesia, yang dimaksud dengan penanaman modal swasta adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri (PMDN) maupun penanam modal luar negeri (PMA). UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjelaskan bahwa penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional, dan ditempatkan sebagai upaya

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka faktor penghambat iklim penanaman modal harus diatasi antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah, menciptakan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.

Berdasarkan data BKPM, kegiatan penanaman modal baik PMDN maupun PMA telah memberikan kontribusi yang besar dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya pada tahun 1990-an. Perkembangan penanaman modal yang pesat telah memberikan berbagai manfaat dan dampak positif untuk perkembangan ekonomi nasional dan lokal. Manfaat dan dampak positif tersebut diantaranya adalah meningkatnya sumber pajak perusahaan dan perseorangan, serta tersedianya lapangan kerja dengan jumlah yang tinggi (Adit, 2006).

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, mengharuskan pemerintah meningkatkan koordinasi dengan pemerintahan daerah dengan semangat otonomi daerah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan instansi atau lembaga harus lebih diberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal. Pemerintah daerah menjalankan otonomi yang luas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas perbantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi kelembagaan tersebut harus dapat diukur dari kecepatan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal dengan biaya yang berdaya saing (UU No.25 tahun 2007).

BAB 3

GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN DAERAH

Dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan potensi-potensi ekonomi yang ada, sehingga dapat memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Bab ini menyajikan gambaran umum perekonomian daerah berdasarkan data tentang pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dalam pertumbuhan PDRB, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan tingkat penanaman modal swasta yang merupakan hasil analisis deskriptif.

Data pertumbuhan ekonomi daerah yang digunakan adalah data pertumbuhan PDRB Riil yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) periode tahun 2002 – 2006 atas dasar harga konstan tahun 2000. Data pendapatan asli daerah kabupaten/kota berasal dari data realisasi APBD tahun anggaran 2002 - 2006 yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan. Data penanaman modal swasta kabupaten/kota periode tahun anggaran 2002 – 2006 bersumber dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Gambaran umum perekonomian daerah pada era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menggunakan data panel di 337 kabupaten/kota di Indonesia periode tahun 2002-2006 dan disajikan dalam dua bagian yaitu, *pertama*, gambaran umum perekonomian daerah berdasarkan letak geografis yang terbagi atas propinsi Jawa-Bali dan propinsi luar Jawa-Bali dan *kedua* gambaran umum perekonomian daerah berdasarkan status administrasi, yang terdiri dari daerah kabupaten dan daerah kota.

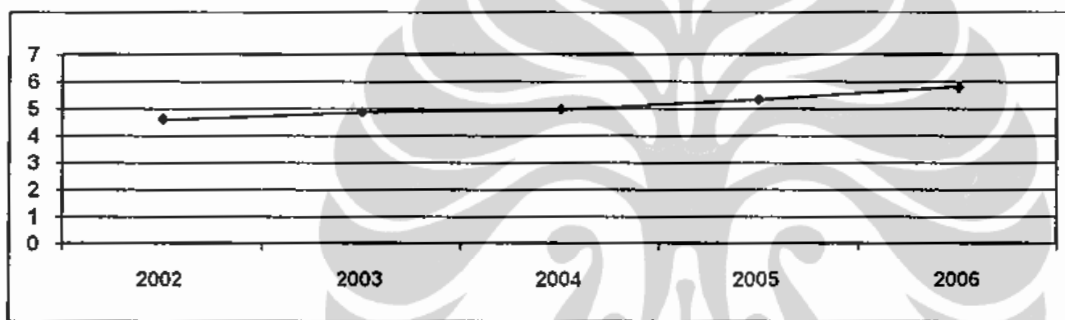
Pembagian berdasarkan letak geografis didasarkan pada kenyataan bahwa propinsi Jawa-Bali yang luasnya hanya 7,2 % dari luas wilayah Indonesia, ternyata dihuni oleh 64 % penduduk Indonesia.

Pembagian berdasarkan status administrasi didasarkan pada asumsi bahwa daerah kabupaten bercirikan agraris sedangkan daerah kota bercirikan industri dan jasa.

3.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu tolok ukur untuk menilai dampak kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat daerah adalah dengan melihat pertumbuhan ekonomi daerah. Perhitungan PDRB yang merupakan penjumlahan hasil-hasil kegiatan ekonomi di suatu daerah selama setahun, akan memberikan gambaran ringkas tentang tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.,

Grafik 3.1 Pertumbuhan PDRB Riil Kabupaten/Kota
Periode Tahun 2002 – 2006 (tahun dasar 2000)



Sumber : Diolah dari data BPS

Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang memberikan kewenangan lebih luas kepada daerah, telah memberikan efek positif terhadap pertumbuhan PDRB. Pada grafik 3.1 terlihat bahwa pada era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal (periode 2002 – 2006) tingkat rata-rata pertumbuhan PDRB kabupaten/kota terus mengalami peningkatan, meskipun tingkat pertumbuhannya masih dibawah tingkat pertumbuhan sebelum terjadinya krisis ekonomi tahun 1998. Sebelum krisis ekonomi tahun 1998, menurut data BPS pertumbuhan PDRB riil berdasarkan harga konstan 1993 adalah rata-rata adalah 7,5 %. Selama periode 2002-2006 rata-rata pertumbuhan PDRB kabupaten/kota adalah 5,1 %. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya baik yang dilakukan oleh peneliti luar maupun dalam

negeri yang menyatakan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal mempunyai pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tabel 3.1 Kabupaten/Kota dengan Rata-Rata Pertumbuhan PDRB Riil Tertinggi Periode 2002-2006 (Tahun dasar 2000)

No	Kabupaten/Kota	Rata-rata PDRB
1	Kabupaten Kutai Timur	16.91 %
2	Kabupaten Nunukan	10.77 %
3	Kota Pekan Baru	10.51 %
4	Kabupaten Kapatang	10.34 %
5	Kabupaten Merauke	10.12 %

Sumber : Diolah dari data BPS

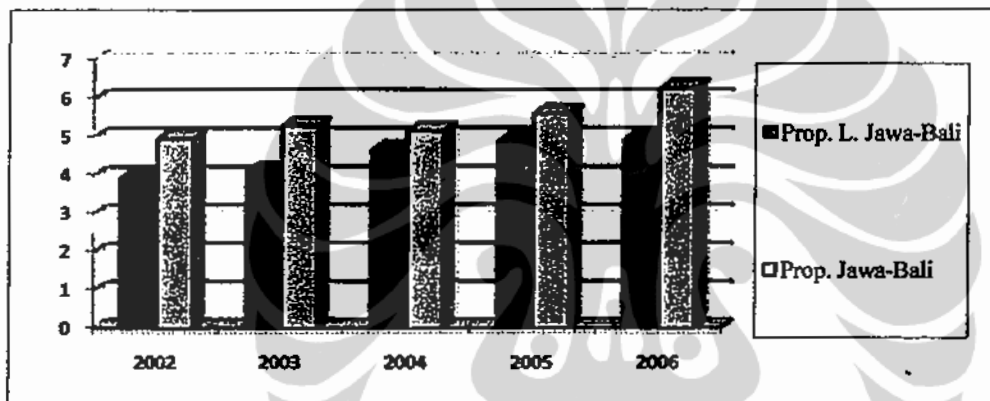
Berdasarkan tabel 3.1 diatas terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan PDRB Riil tertinggi pada era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal didominasi oleh daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah terutama minyak seperti Kabupaten Kutai Timur (16.91 %) dan Kabupaten Nunukan (10,77 %). Hal ini didorong oleh adanya kebijakan bagi hasil sumber daya alam, sebagai bagian dari dana perimbangan. Berdasarkan UU No.33 tahun 2004 bahwa penerimaan bagi hasil pertambangan minyak bumi setelah dikurangi pajak dan komponen biaya lainnya maka dibagi dengan proporsi 84,5 % untuk pemerintah pusat dan 15,5 % untuk daerah. Dengan adanya pola bagi hasil sumber daya alam yang mengalami perbaikan dan semakin menguntungkan daerah ini, maka akan lebih mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kebijakan ini sebenarnya juga berakibat pada adanya ketimpangan pertumbuhan ekonomi antardaerah yang tinggi. Kenyataan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Joko (2007) yang menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih tinggi di daerah pusat bisnis dan daerah yang kaya sumber daya alam dari pada daerah yang bukan pusat bisnis dan miskin sumber daya alam. Penelitian lain yang mendukung adalah Saefulloh, (2003) yang menjelaskan bahwa era otonomi daerah dan

desentralisasi fiskal merupakan momentum untuk melakukan percepatan pembangunan daerahnya. Kondisi seperti ini memungkinkan daerah yang bersangkutan dapat tumbuh lebih cepat dari pada daerah lain.

Analisis pertumbuhan PDRB riil berdasarkan letak geografis pada era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dapat dijelaskan sebagai berikut :

Grafik 3.2 Pertumbuhan PDRB Riil Kabupaten/Kota Berdasarkan Letak Geografis Periode Tahun 2002-2006 (tahun dasar 2000)

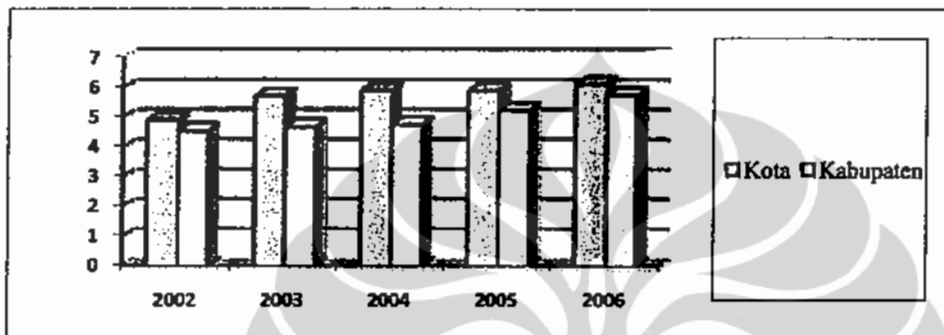


Sumber : Diolah dari data BPS

Berdasarkan grafik 3.2 diatas terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan PDRB kabupaten/kota di propinsi Jawa-Bali mengalami peningkatan yang lebih besar dibandingkan dengan di luar propinsi Jawa/Bali. Hal ini menunjukkan bahwa secara nasional, perekonomian Indonesia nampaknya masih terpusat di propinsi Jawa-Bali. Sebagaimana penelitian Makmun (2004) bahwa rata-rata pertumbuhan PDRB kabupaten/kota propinsi Jawa-Bali pada era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal meningkat lebih pesat dibandingkan dengan kabupaten/kota di luar Jawa-Bali. Tingginya rata-rata PDRB kabupaten/kota di Jawa-Bali dan daerah perkotaan disamping disebabkan oleh terpusatnya industri pengolahan, juga disebabkan pula oleh besarnya alokasi dana dari pusat baik dalam bentuk dana Inpres maupun Alokasi Dana Sektorial pada masa sebelum diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Analisis pertumbuhan PDRB riil berdasarkan status administrasi pada era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dapat dijelaskan sebagai berikut :

Grafik 3.3 Pertumbuhan PDRB Riil Kabupaten/Kota Berdasarkan Status Administrasi Periode Tahun 2002-2006 (tahun dasar 2000)



Sumber : Diolah dari data BPS

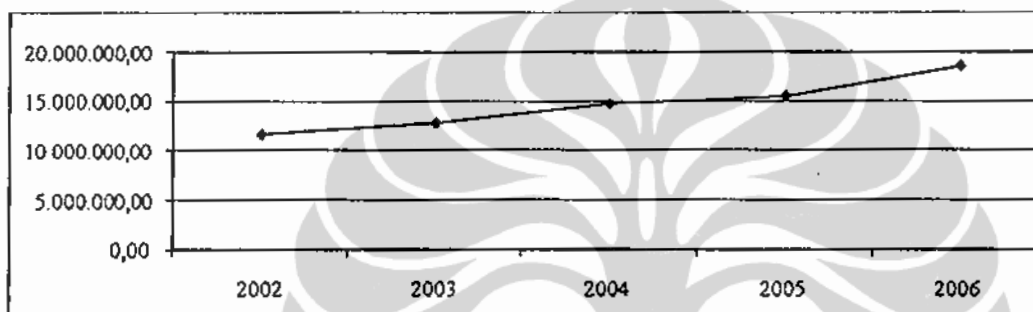
Berdasarkan grafik 3.3 diatas terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan PDRB daerah kota mengalami peningkatan yang lebih besar dibandingkan dengan daerah kabupaten hal ini mengindikasikan bahwa akumulasi modal yang didapat dari dana perimbangan maupun pendapatan asli daerah serta karakteristik faktor produksi yang dimiliki daerah kota lebih besar dari pada kabupaten. Dana perimbangan daerah kota terutama yang berasal dari dana bagi hasil yang bersumber dari penerimaan PBB, BPHTB, penerimaan sumber daya alam dan bagi hasil pajak penghasilan yang dapat dihimpun lebih besar dibandingkan dengan daerah kabupaten, sehingga hal ini mendorong pertumbuhan PDRB daerah kota lebih tinggi dibandingkan daerah kabupaten.

3.2 Pendapatan Asli Daerah

Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah disertai pengalihan personil, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah.

Meskipun daerah menerima dana perimbangan dari pemerintah pusat, namun daerah tetap harus lebih kreatif dalam meningkatkan PAD-nya dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan keeluasaan dalam pembelanjaan APBD. Sumber-sumber penerimaan daerah harus digali secara maksimal, namun tentu saja harus tetap di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Grafik 3.4 Jumlah PAD Kabupaten/Kota
Periode Tahun 2002 – 2006



Sumber : Diolah dari data DJPK Depkeu

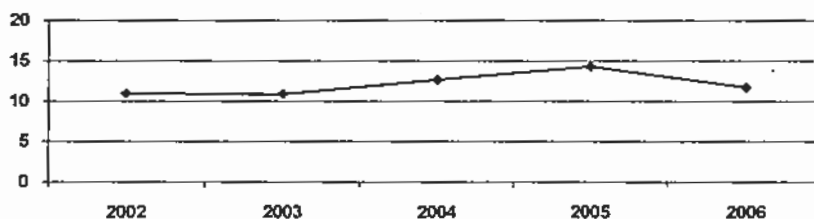
Grafik 3.4 diatas menunjukkan bahwa secara nominal jumlah PAD pada periode tahun 2002 - 2006 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data dari DJPK Departemen Keuangan, bahwa secara rata-rata jumlah PAD periode tahun 2002 - 2006 mengalami peningkatan sebesar 292.54 % dibandingkan dengan periode 1996 - 2000 (sebelum era desentralisasi). Rata-rata jumlah PAD kabupaten/kota periode 1996-2000 adalah Rp 12.859,79 juta dan rata-rata jumlah PAD periode 2002 – 2006 adalah Rp 37.619,46 juta. Hal ini dapat diartikan bahwa pada era otonomi daerah, pemerintah daerah sudah mulai mampu menggali potensi-potensi pendapatan asli dari daerahnya. Peningkatan jumlah nominal PAD ini merupakan hasil dari diberikannya keeluasaan kepada pemerintah daerah melalui pajak dan retribusi daerah berdasarkan UU No.34 tahun 2000. Disamping itu kebijakan otonomi daerah, oleh sebagian besar pemerintah daerah telah dimaknai sebagai *automoney*, sehingga dengan dalih untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah (PAD), pemerintah

daerah menerapkan berbagai pungutan baik yang berupa pajak, retribusi maupun sumbangan lainnya.

Secara umum pajak daerah dan retribusi daerah adalah pemberi kontribusi utama PAD kabupaten/kota. Disparitas penerimaan daerah untuk kedua komponen penerimaan ini masih besar. Hal ini menunjukkan andalan penerimaan daerah yang berbeda-beda. Satu daerah lebih mengandalkan penerimaan pajak daerah, sementara itu daerah lain lebih mengandalkan retribusi daerah. Rata-rata penerimaan pajak daerah adalah 58,85 % dari PAD dan penerimaan retribusi daerah adalah 22,92% dari PAD.

Peningkatan jumlah PAD secara riil ternyata tidak diikuti dengan peningkatan peranan PAD terhadap penerimaan APBD kabupaten/kota. Peranan PAD terhadap penerimaan APBD Kabupaten/Kota masih relatif kecil dan ada kecenderungan terus menurun. Pada grafik 3.5 terlihat bahwa rata-rata presentase PAD terhadap total penerimaan kabupaten/kota pada periode 2002-2006 adalah 12.11 %, sedangkan untuk periode 1996 – 2000 rata-rata kontribusi PAD terhadap total penerimaan kabupaten/kota adalah sebesar 18,41 %. Menurunnya kontribusi PAD terhadap penerimaan kabupaten/kota mengindikasikan bahwa penurunan terhadap ketergantungan pembiayaan pembangunan dari pusat belum nampak, bahkan ada kecenderungan yang sebaliknya yaitu semakin besar ketergantungan pada sumber pembiayaan pembangunan dari pusat yang berupa dana perimbangan.

Grafik 3.5 Presentase PAD Terhadap Penerimaan APBD Kabupaten/Kota Periode Tahun 2002 – 2006



Sumber : Diolah dari data DJPK Depkeu

Hasil studi yang dilakukan oleh LPEM-UI bekerjasama dengan *Clean Urban Project* sebagaimana dikutip oleh Tjip Ismail (2002) menjelsakan bahwa beberapa permasalahan yang terjadi di daerah berkaitan dengan penggalian dan peningkatan PAD, terutama disebabkan oleh :

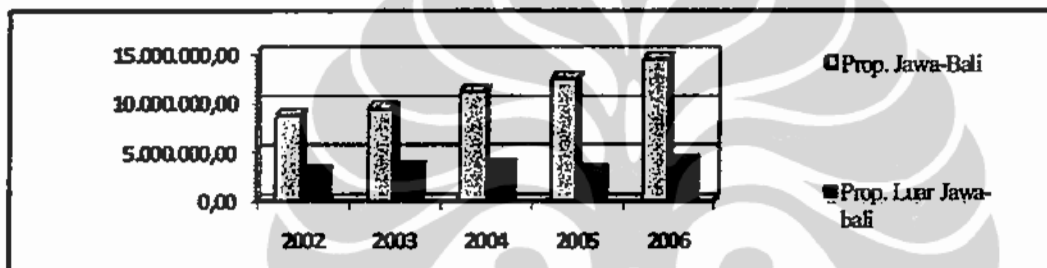
1. Relatif rendahnya basis pajak daerah dan retribusi daerah. Meskipun dalam UU No.34 tahun 2000 daerah kota/kabupaten dimungkinkan untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru, namun kriteria pengadaan pajak baru sangat ketat dan diperkirakan daerah memiliki basis pungutan pajak yang relatif rendah dan terbatas, serta sifatnya bervariasi antar daerah ;
2. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah. PAD masih tergolong memiliki tingkat *buoyancy* yang rendah. Salah satunya sebabnya adalah diterapkannya sistem „target“ dalam pungutan daerah. Sebagai akibatnya, beberapa daerah lebih condong memenuhi taget tersebut, walaupun dari sisi pertumbuhan ekonomi sebenarnya pemasukan pajak dan retribusi daerah dapat melampaui target.
3. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang masih rendah sehingga mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah.

Tidak signifikannya peran PAD dalam anggaran daerah menurut Sidik (2002) adalah „*sistem tax assignment*“ di Indonesai yang masih memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah pusat untuk mengumpulkan pajak-pajak potensial (yang tentunya dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu), seperti : pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan bea masuk, Kenyataan selama ini menunjukkan bahwa distribusi kewenangan perpajakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat timpang. Ketimpangan dalam penguasaan sumber-sumber penerimaan pajak tersebut memberikan petunjuk bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dari sisi penerimaan masih terlalu sentralistis.

Analisis PAD berdasarkan berdasarkan letak geografis sebagaimana terlihat pada grafik 3.6 dibawah ini terlihat bahwa secara nominal, jumlah PAD

kabupaten/kota di propinsi Jawa-Bali jauh lebih tinggi dibandingkan dengan PAD kabupaten/kota di luar propinsi luar Jawa Bali. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi PAD terutama yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah berdasarkan UU No. 34 tahun 2000 lebih banyak terdapat di kabupaten/kota di propinsi Jawa-Bali sehingga sumber penerimaan PAD pun menjadi lebih banyak.

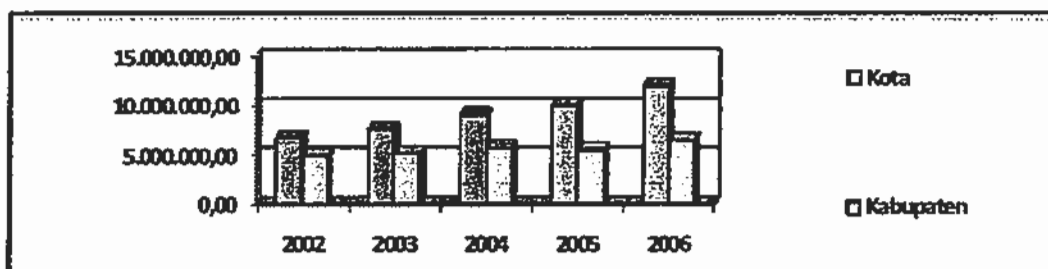
Grafik 3.6 Jumlah PAD Kabupaten/Kota Berdasarkan Letak Geografis Periode Tahun 2002-2006



Sumber : Diolah dari data DJPK Depkeu

Analissi berdasarkan status administrasi dapat dijelaskan bahwa secara nominal, jumlah PAD daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah kabupaten sebagaimana terlihat pada grafik 3.7.

Grafik 3.7 Jumlah PAD Kabupaten/Kota Berdasarkan Letak Geografis Periode Tahun 2002-2006



Sumber : Diolah dari data DJPK Depkeu

Lebih besarnya jumlah PAD daerah perkotaan dibandingkan dengan jumlah PAD daerah kabupaten mengindikasikan bahwa potensi PAD terutama yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah berdasarkan UU No. 34 tahun 2000 seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan lebih banyak terdapat di daerah perkotaan sehingga sumber penerimaan PAD pun menjadi lebih banyak.

3.3 Dana Perimbangan

Pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan dalam bentuk DAU, DBH, dan DAK. Tabel 3.2 memperlihatkan bahwa dana perimbangan telah meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari SMERU (2007) bahwa sepanjang periode tahun 2002–2006, nilai riil DAK telah meningkat lebih dari 17.5 kali, atau rata-rata 390% per tahun. Di samping itu, rasionya terhadap DAU meningkat dari 0.9% pada tahun 2002 menjadi 7,9 % pada tahun 2006, sementara rasionya terhadap DBH meningkat dari 2,3 % pada tahun 2002 menjadi 19,42 % pada tahun 2006. Selain karena peningkatan anggaran pada setiap bidang yang mendapatkan dana DAK, peningkatan DAK ini juga merupakan hasil dari perluasan lingkup setiap bidang yang didanai DAK dan peningkatan jumlah kabupaten/kota penerima DAK. Meskipun terdapat peningkatan nilai riil dari tahun ke tahun, nilai total DAK masih sangat rendah dalam keseluruhan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pada tahun 2006, proporsi DAK dalam total pengeluaran APBN adalah 2,2%, sementara dalam total penerimaan APBN, proporsinya adalah 2,4%.

Tabel 3.2 Perbandingan DAK, DAU, DBH
Periode Tahun 2002 – 2006 (miliar rupiah)

No	Uraian	2002	2003	2004	2005	2006
1	DAK	658	2.617	3.650	4.323	11.570
2	DAU	69.114	76.978	82.130	88.765	145.664
3	DBH	24.266	27.896	37.368	31.218	59.564

Sumber : SMERU 2007

Pemerintah menetapkan bidang penerima DAK sesuai dengan prioritas nasional yang ditentukan dalam RKP untuk tahun yang bersangkutan. Perubahan terhadap prioritas pembangunan sebagaimana tercatat dalam RKP akan mencerminkan perubahan pada bidang-bidang ke mana DAK disalurkan. Pada 2005 dan 2006, sesuai dengan prioritas pembangunan untuk tahun-tahun tersebut, pembangunan infrastruktur menerima proporsi DAK terbesar. Perkembangan DAK perbidang sebagaimana terlihat pada tabel 3.3 dibawah ini.

Tabel 3.3 Perkembangan DAK per Bidang
Periode Tahun 2002 – 2006 (miliar rupiah)

No	Bidang/Sektor	2003	2004	2005	2006
1	Pendidikan	625.000	652.600	1.221.000	2.919.525
2	Kesehatan	375.000	456.180	629.000	2.406.795
3	Infrastruktur	1.181.000	1.196.250	1.533.000	3.811.380
	a. Jalan	-	839.050	945.000	2.575.705
	b. Irigasi	-	357.200	384.500	627.675
	c. Air Bersih	-	0	203.500	608.000
4	Prasarana Pemerintah	88.000	228.000	148.000	448.675
5	Kelautan dan perikanan	0	305.470	322.000	775.675
6	Pertanian	0	0	170.000	1.094.875
7	Lingkungan Hidup	0	0	0	112.875

Sumber : SMERU 2007

Analisis dana alokasi khusus berdasarkan berdasarkan letak geografis sebagaimana pada tabel 3.4 terlihat bahwa rata-rata alokasi DBH&DAK kabupaten/kota di propinsi Jawa-Bali lebih besar dibandingkan dengan kabupaten/kota di luar Jawa-Bali.

Kenyataan bahwa rata-rata alokasi DBH&DAK kabupaten/kota di propinsi Jawa-Bali menerima lebih besar dari pada kabupaten/kota di luar propinsi Jawa-Bali Hal ini menunjukkan bahwa akumulasi modal yang bersumber dari pemerintah pusat lebih banyak dinikmati oleh kabupaten/kota di propinsi Jawa-Bali. Hal ini terutama bersumber dari bagi hasil, baik bagi hasil pajak maupun

Tabel 3.4 Rata-rata Alokasi DBH&DAK Berdasarkan Letak Geografis
Periode Tahun 2002 – 2006 (juta rupiah)

No	Uraian	2002	2003	2004	2005	2006
1	Kab/Kota Jawa-Bali	59.291,39	22.876,47	71.221,33	77.589,11	110.545,86
2	Kab/Kota L. Jawa Bali	57.358,40	20.351,25	31.755,12	58.581,86	90.168,84

Sumber : Diolah dari data DJPK Depkeu

Analisis dana alokasi khusus berdasarkan berdasarkan satatus administrasi sebagaimana pada tabel 3.5 terlihat bahwa rata-rata alokasi DBH&DAK daerah kota lebih besar dibandingkan dengan kabupaten. Hal ini mengindikasikan bahwa akumulasi modal untuk investasi yang berasal dari pemerintah pusat lebih banyak diterima oleh daerah kota. Selain itu hal ini juga mengindikasikan bahwa potensi dana bagi hasil terutama dari bagi hasil pajak lebih besar terdapat di daerah kota.

Tabel 3.5 Rata-rata DBH&DAK Berdasarkan Status Administrasi
Periode Tahun 2002 – 2006 (juta rupiah)

No	Uraian	2002	2003	2004	2005	2006
1	Daerah Kabupaten	49.700,60	20.862,42	44.493,85	58.633,94	81.064,98
2	Daerah Kota	82.540,32	22.075,37	44.598,15	82.801,47	143.289,54

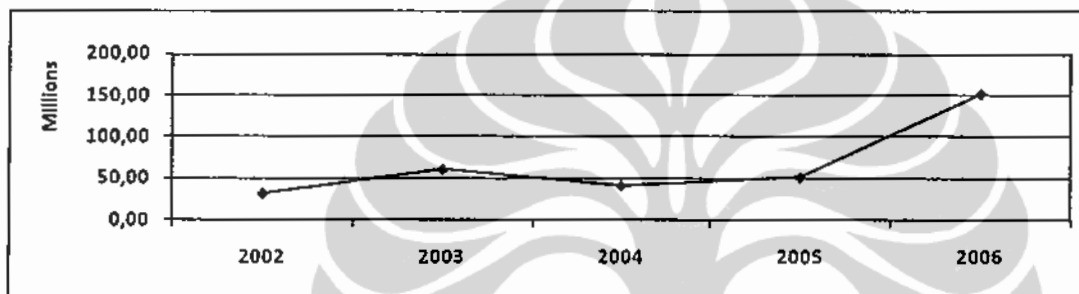
Sumber : Diolah dari data DJPK Depkeu

3.4 Penanaman Modal Swasta

Penanaman modal swasta dalam rangka PMDN dan PMA seluruhnya akan semakin dituntut peran aktifnya dan menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional. Penanaman modal swasta sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional, penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan telah mengalami pasang surut.

Pada awal pelaksanaan desentralisasi fiskal ternyata telah mengakibatkan terjadinya birokrasi yang berbelit-belit, ketidakpastian biaya dan lamanya waktu berurusan dengan perizinan dan birokrasi. Hal ini secara tidak langsung telah memperburuk iklim investasi, sehingga jumlah penanam modal terus mengalami penurunan.

Grafik 3.8 Jumlah Penanaman Modal Swasta (PMDN dan PMA)
Kabupaten Kota Tahun 2002 – 2005



Sumber : Diolah dari data BKPM

Penelitian KPPOD (2002,2003) terhadap 134-200 kabupaten/kota di Indonesia menunjukkan bahwa institusi merupakan faktor utama yang menentukan daya tarik investasi di suatu daerah, kemudian diikuti oleh kondisi sosial politik, infrastruktur fisik, kondisi ekonomi daerah dan produktifitas tenaga kerja. LPEM UI (2001) menyoroti bahwa otonomi daerah justru meningkatkan biaya ketidakpastian berusaha di kabupaten/kota. Korupsi dan pungli oleh oknum aparat pemerintah yang dihadapi oleh pengusaha cenderung menurunkan efisiensi ekonomi, bukan memperlancar transaksi ekonomi. Dalam survei pelayanan institusi publik, WEF (2005) menempatkan Indonesia pada peringkat 89 dari 117 negara.

Untuk mengatasi masalah panjangnya birokrasi, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya Keppres No. 29 tahun 2004 mengenai penyelenggaraan penanaman modal (PMDN/PMA) melalui sistem pelayanan satu atap (*one roof service*). Konsekuensinya dari keppres ini, penyelenggaraan

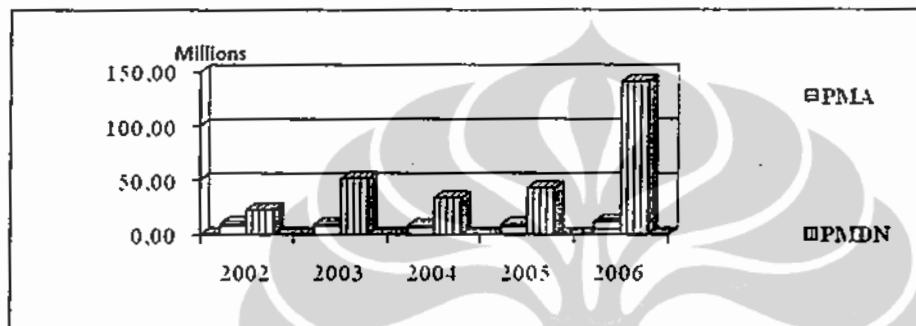
penanaman modal khususnya yang berkaitan dengan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN dilakukan oleh BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Permendagri No.24 tahun 2006 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengatur bahwa pelayanan atas permohonan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) yaitu perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu. Pembinaan sistem ini dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Menteri Dalam Negeri dan Kepala Daerah sesuai dan kewenangan masing-masing. Pemerintah dan DPR telah mengesahkan UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dengan disahkannya UU tersebut diharapkan terjadi peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri dan pada akhirnya akan mempercepat pembangunan ekonomi nasional.

Perkembangan penanaman modal yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan data realisasi BKPM (Grafik 3.9) menunjukkan bahwa PMDN masih lebih dominan dibandingkan dengan PMA. PMA sempat menjadi primadona dalam mitra pembangunan sebelum terjadinya krisis perekonomian. Dalam laporan Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009, pemerintah menjelaskan berbagai kendala yang terkait dengan PMA yaitu *pertama* adanya persiangan kebijakan investasi yang dilakukan oleh negara-negara pesaing seperti China, Vietnam, Thailand dan Malaysia, *kedua* masih rendahnya kepastian hukum dalam bidang penanaman modal, *ketiga* lemahnya insentif atas penanaman modal, *keempat* kualitas SDM yang rendah dan terbatasnya infrastruktur, *kelima* tidak adanya kebijakan yang jelas untuk mendorong pengalihan teknologi dari PMA, *keenam* masih tingginya biaya ekonomi karena tingginya kasus korupsi, keamanan dan penyalahgunaan wewenang, *ketujuh* meningkatnya nilai tukar riil efektif rupiah.

Upaya awal yang paling mendasar adalah membangun kesiapan sumber daya manusia yang terampil dan cekatan, ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana

industri seperti pergudangan, jalur transportasi, sumber energi, air bersih, memberika kemudahan yang paling mendasar atas pelayanan yang ditujukan pada para investor, meliputi perijinan penanaman modal, imigrasi, kepabeanan, perpajakan dan keamanan wilayah.

Grafik 3.9 Jumlah Penanaman Modal Kabupaten Kota Menurut PMDN dan PMA Periode Tahun 2002-2006



Sumber : Diolah dari data BKPM

Berdasarkan analisis deskriptif tentang gambaran umum perekonomian daerah pada era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diatas dapat disampaikan beberapa kesimpulan :

1. Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur dengan pertumbuhan PDRB riil Kabupaten/kota mengalami peningkatan ;
 - a. Pertumbuhan PDRB riil kab/kota di Popinsi Jawa-Bali lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB riil kab/kota di luar Popinsi Jawa-Bali ;
 - b. Pertumbuhan PDRB riil daerah kota lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB riil daerah kabupaten ;
2. Meskipun nilai riil PAD mengalami peningkatan, namun peranan PAD terhadap total penerimaan daerah masih relative kecil dan ada kecenderungan mengalami penurunan ;

- a. Peranan terhadap total penerimaan daerah, untuk PAD kab/kota di Popinsi Jawa-Bali lebih besar dibandingkan dengan kab/kota di luar Popinsi Jawa-Bali ;
 - b. Peranan terhadap total penerimaan daerah, untuk PAD daerah kota lebih besar dibandingkan dengan daerah kabupaten ;
3. Meskipun nilai riil alokasi DBH&DAK mengalami peningkatan, namun peranan dalam dana perimbangan masih relative kecil dibandingkan DAU, sehingga alokasi dana perimbangan pemerintah pusat justru lebih banyak digunakan untuk keperluan belanja rutin dibandingkan belanja pembangunan/belanja modal
- a. Alokasi DHB&DAK kab/kota di Popinsi Jawa-Bali lebih besar dibandingkan dengan kab/kota di luar Popinsi Jawa-Bali ;
 - b. Alokasi DBH&DAK daerah kota lebih besar dibandingkan dengan daerah kabupaten ;
4. Pada awal pelaksanaan otonomi ternyata telah mengakibatkan terjadinya birokrasi yang berbelit-belit, ketidakpastian biaya dan lamanya waktu berurusan dengan perizinan. Hal ini secara tidak langsung telah memperburuk iklim investasi, sehingga jumlah penanam modal terus mengalami penurunan.

BAB 4 ANALISIS MODEL PERTUMBUHAN EKONOMI

Analisis hasil regresi ini mengemukakan model regresi dan diuji sesuai dengan persyaratan yang ditentukan untuk mendapatkan model yang terbaik sehingga mampu menjelaskan permasalahan yang hendak dijawab dan sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk mengestimasi parameter model dengan data panel dalam penelitian ini menggunakan Metode Efek Tetap (MET). Untuk metode MET sesungguhnya adalah sama dengan regresi yang menggunakan *dummy variable* untuk menangkap adanya perbedaan *intercept*.

Dalam menjelaskan pengaruh PAD, dana perimbangan khususnya DBH&DAK, dan penanaman modal swasta terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal digunakan model sebagai berikut :

$$\ln \text{PDRB} = \beta_0 + \beta_1 \ln \text{PAD} + \beta_2 \ln \text{DBHDAK} + \beta_3 \ln \text{PMS} + \beta_4 \ln \text{POP} + \epsilon \dots\dots\dots(4.1)$$

Model pertumbuhan ekonomi tersebut mengacu kepada fungsi produksi, dimana secara sederhana, produk domestik regional bruto (Y), dipengaruhi oleh jumlah modal (K) dan jumlah tenaga kerja (L) yang tersedia dalam perekonomian. Dengan kata lain variabel-variabel ekonomi yang berpotensi mempengaruhi pertumbuhan PDRB diantaranya adalah adanya akumulasi modal (K) dan tenaga kerja (L).

Dimana pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam model ini adalah pertumbuhan PDRB. K adalah kapital stok daerah yang diproksi dengan akumulasi investasi daerah. Akumulasi investasi daerah terdiri dari akumulasi investasi pemerintah dan investasi swasta. Sumber-sumber pembiayaan investasi yang berasal dari pemerintah dan tertuang dalam APBD meliputi pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan khususnya dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi khusus (DAK). PAD merupakan sumber pembiayaan investasi yang berasal dari pemerintah daerah yang bersangkutan dan dana perimbangan khususnya Dana Bagi Hasil dan

Dana Alokasi Khusus merupakan sumber pembiayaan investasi yang berasal dari pemerintah pusat. Investasi swasta berupa PMDN dan PMA. L adalah tenaga kerja yang dinyatakan dalam jumlah penduduk (Populasi).

4.1 Definisi operasional

Dalam kenyataannya satu variabel ekonomi dapat memiliki berbagai macam definisi yang kadangkala dalam model ekonometri berbeda satu sama lain. Penelitian empiris ini perlu adanya definisi yang jelas dan operasional dari variabel-variabel yang digunakan. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian yang dilakukan dan untuk memudahkan pemahaman lebih lanjut. Definisi operasional masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. PDRB kabupaten/kota dalam penelitian ini adalah PDRB riil kabupaten/kota periode tahun 2002 - 2006 dengan tahun dasar 2000 yang dinyatakan dalam juta rupiah. Data PDRB riil kabupaten/kota ini diperoleh dari BPS.
2. PAD kabupaten/kota adalah penjumlahan atas pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan lain-lain pendapatan yang dinyatakan dalam juta rupiah. Data ini bersumber dari Buku APBD DJPK Departemen Keuangan RI.
3. DBHDAK kabupaten/kota adalah dalam penelitian ini merupakan penjumlahan atas dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi khusus (DAK) kabupaten/kota yang dinyatakan dalam juta rupiah. Data ini bersumber dari Buku APBD Ditjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan RI.
4. Penanaman modal swasta adalah segala bentuk kegiatan menanam modal swasta, baik oleh penanam modal dalam negeri (PMDN) maupun penanam modal asing (PMA). Data penanaman modal dalam penelitian ini merupakan penjumlahan dari penanaman modal baru, perluasan dan alih status yang dinyatakan dalam juta rupiah. Data ini bersumber dari BKPM.

4.2 Hasil Estimasi

Dalam menjelaskan pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil & dana alokasi khusus dan penanaman modal swasta terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota digunakan model pertumbuhan ekonomi sebagai berikut :

$$\ln \text{PDRB} = \beta_0 + \beta_1 \ln \text{PAD} + \beta_2 \ln \text{DBHDAK} + \beta_3 \ln \text{PMS} + \beta_4 \ln \text{POP} + \epsilon$$

Tabel 4.1. Hasil Estimasi MET

Variable	Koefisien
In PAD	0.058993***
In DBHDAK	0.130733***
In PMS	0.004996 ***
In POP	-0.075467 ***
R ²	0.998200
Adj R ²	0.996543
Prob (F Stat)	0,00000

Sumber : Diolah dari hasil eviews

Level Signifikasi:

*** 1% signifikansi ** 5% signifikansi * 10% signifikansi

Dari hasil estimasi yang disajikan dalam table 4.1 di atas, menunjukkan hasil yang bagus karena memiliki nilai Adj R² yang sangat besar yaitu 0.996543. Ini berarti bahwa variable PAD, DBHDAK, PMS dan POP yang digunakan untuk menjelaskan ekonomi kabupaten kota memiliki hubungan yang sangat kuat. Atau dengan kata lain bahwa 99,65 % variabel pertumbuhan produk domestik regional bruto kabupaten/kota dapat dijelaskan oleh variabel penjelas yaitu pendapatan asli daerah, danabagihasil & dana alokasi khusus, penanaman modal swasta dan populasi. Sisanya sebesar kurang dari 0,35 % diterangkan oleh variabel lain di luar variabel-variabel tersebut. Hubungan yang kuat juga didukung dengan hasil uji F dan uji t yang signifikan. Signifikansi uji F mengandung arti bahwa secara bersama-sama variabel independent dapat menjelaskan variabel dependent, sedangkan signifikan

uji *t* memperlihatkan bahwa secara sendiri-sendiri variabel independent dapat menjelaskan variabel dependent.

Variabel PAD menunjukkan arah hubungan yang positif dan dapat menjelaskan pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pendapatan asli daerah dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dapat diterima. Hubungan ini mempunyai arti apabila PAD meningkat maka pertumbuhan PDRB juga akan meningkat.

Variabel DBHDAK menunjukkan arah hubungan yang positif dan dapat menjelaskan pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti bahwa hipotesa yang menyatakan bahwa diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan antara DBH&DAK dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dapat diterima. Hubungan ini mempunyai arti apabila DBHDAK meningkat maka pertumbuhan PDRB juga akan meningkat.

Variabel PMS menunjukkan arah hubungan yang positif dan dapat menjelaskan pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti bahwa hipotesa yang menyatakan bahwa diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan antara PMS dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dapat diterima. Hubungan ini mempunyai arti apabila PMS meningkat maka pertumbuhan PDRB juga akan meningkat.

Variabel Populasi dapat menjelaskan pertumbuhan ekonomi namun arah hubungannya menunjukkan arah yang negative. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah penduduk yang besar dan pertumbuhan yang tinggi tidak selalu menguntungkan. Apabila lapangan kerja yang tersedia tidak mampu menampung peningkatan jumlah angkatan kerja yang terus bertambah setiap tahunnya akibatnya adalah angka pengangguran akan terus meningkat. Sehingga jumlah penduduk yang besar dan pertumbuhan yang tinggi justru membebani perekonomian.

Dalam metode efek tetap (MET), perbedaan karakteristik individu dan waktu diakomodasikan pada *intercept*. Dalam model pertumbuhan ekonomi ini perbedaan karakteristik pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota terlihat dari *intercept* hasil estimasi. Untuk karakteristik daerah berdasarkan geografis, hasil estimasi menunjukkan bahwa rata-rata *intercept* kabupaten/kota yang berada di Jawa-Bali lebih

tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah yang berada di luar Jawa-Bali sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.2. Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten/kota yang mempunyai pertumbuhan ekonomi terbesar adalah kabupaten/kota yang berada di propinsi Jawa-Bali.

Tabel 4.2 Nilai Intercept Kabupaten/Kota Berdasarkan Letak Geografis

No	Kabupaten/Kota	Nilai Intercept		
		Min	Max	Rata-Rata
1	Kab/Kota di Propinsi Jawa-Bali	12,33247	16,19931	14,10243
2	Kab/Kota di Luar Prop. Jawa-bali	10,69214	15,76561	13,28765

Sumber : Diolah dari hasil eviews

Sepuluh kabupaten/kota yang memiliki *intecept* terbesar adalah pusat-puast perekonomian yang berlokasi di pulau Jawa, dan kota Bekasi yang terbesar. Ada tiga kota yang berasal dari luar pulau Jawa yang masuk dalam 10 besar yaitu kab. Pasir, kota Medan dan kota Batam sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 4.3

Tabel 4.3 Kabupaten/Kota dengan Nilai Intercept Terbesar

No	Kabupaten/Kota	Nilai Intercept	Nomor Urut
1	Kab Bekasi	16,19931	1
2	Kota Jakarta	16,06849	2
3	Kab. Bandung	15,98014	3
4	Kab. Bogor	15,80685	4
5	Kab. Pasir	15,76561	5
6	Kota Medan	15,7489	6
7	Kab. Sidoarjo	15,68379	7
8	Kota Tangerang	15,61419	8
9	Kota Batam	15,49772	9
10	Kota Bandung	15,4476	10

Sumber : Diolah dari hasil eviews

Sepuluh kabupaten/kota yang memiliki *intecept* terendah adalah kota-kota yang berada di kawasan Indonesia Timur dan kabupetn Lembata adalah yang terendah sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 4.4.

Tabel 4.4 Kabupaten/Kota dengan Nilai Intercept Terkecil

No	Kabupaten/Kota	Nilai Intercept	Nomor Urut
1	Kota Gorontalo	11,92425	328
2	Kab. Maluku Tenggara	11,91207	329
3	Kota Ternate	11,89135	330
4	Kota Solok	11,87646	331
5	Kab. Kepulauan Mentawai	11,8556	332
6	Kab. Timor Tengah Utara	11,83892	333
7	Kab. Selayar	11,65035	334
8	Kab. Alor	11,57911	335
9	Kab. Pulau Buru	11,30661	336
10	Kab. Lembata	10,69214	337

Sumber : Diolah dari hasil eviews

Untuk karakteristik daerah berdasarkan status administrasi, hasil estimasi menunjukkan bahwa rata-rata *intecept* daerah dengan status administrasi kota sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan daerah dengan status administrasi kabupaten sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.5. Hal ini menunjukkan bahwa daerah yang mempunyai pertumbuhan ekonomi terbesar adalah daerah dengan status administrasi kota.

Tabel 4.5 Nilai Intercept Kabupaten/Kota Berdasarkan Status Administrasi

No	Kabupaten/Kota	Nilai Intercept		
		Min	Max	Rata-Rata
1	Daerah Kota	11,87646	16,04869	13.83765
2	Daerah Kabupaten	10,69214	16,19931	13,52594

Sumber : Diolah dari hasil eviews

4.3 Analisis Hasil Estimasi

Berdasarkan hasil estimasi diatas memperlihatkan bahwa kegiatan investasi daerah baik yang berasal dari pemerintah maupun swasta mempunyai hubungan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi. Adanya hubungan yang positif ini memberikan arti bahwa kerangka berpikir yang dibangun dalam penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian empirik sebelumnya. Penelitian ini memperkuat studi yang dilakukan oleh Davoodi, Xie dan Zou (1995).

Meskipun terbukti bahwa investasi daerah mempunyai hubungan yang positif terhadap pertumbuhan, tetapi pengaruhnya relatif kecil seperti yang ditunjukkan dari kecilnya nilai koefisien. Dari nilai koefisien diperoleh hasil bahwa jika perubahan PAD naik 1 % maka PDRB kabupaten/kota akan tumbuh sebesar 0.058993 %. Jika perubahan DBHDAK naik 1 % maka PDRB kabupaten/kota akan tumbuh sebesar 0.130733 % dan jika perubahan PMS naik 1 % maka PDRB kabupaten/kota akan tumbuh sebesar 0.004996 %. Rendahnya pengaruh investasi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dapat disebabkan karena masih rendahnya penerimaan daerah yang akan dijadikan sumber pembiayaan investasi, baik yang berasal dari pemerintah daerah melalui PAD, pemerintah pusat melalui DBH dan DAK, maupun dari pihak swasta melalui PMDN dan PMA.

Dari sisi dana perimbangan, meskipun dana perimbangan terus mengalami peningkatan namun proporsi terbesar adalah untuk DAU sedangkan DAU sendiri dilokasikan untuk keperluan belanja rutin. Pada saat yang sama, rendahnya penerimaan dari pemerintah pusat ini tidak didukung oleh peningkatan peran PAD terhadap penerimaan daerah dan investasi swasta dalam bentuk PMA dan PMDN juga masih banyak menemui kendala. Sehingga hal ini berakibat akumulasi modal untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi menjadi lebih kecil.

Di era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pungutan pajak dan retribusi daerah (PAD) memang masih belum dapat diandalkan oleh daerah sebagai sumber

pembiayaan investasi. Kondisi ini diperlihatkan dalam studi yang dilakukan oleh LPEM-UI dengan Clean Urban Project bahwa masih banyak permasalahan yang terjadi di daerah berkaitan dengan penggalan dan peningkatan PAD yaitu relatif rendahnya basis pajak dan retribusi daerah, perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah, kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah, kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang masih rendah. Selain itu, tidak signifikannya peran PAD dalam anggaran daerah menurut Sidik disebabkan karena „*sistem tax assignment*“ di Indonesai yang masih memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah pusat untuk mengumpulkan pajak-pajak potensial. Peranan pajak dan retribusi daerah yang rendah dan bervariasi juga terjadi karena adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis dan kemampuan masyarakat (Ismail, 2002).

Peranan PAD terhadap penerimaan APBD kabupaten/kota masih relatif kecil dan ada kecenderungan terus menurun. Rata-rata kontribusi PAD terhadap total penerimaan kabupaten/kota 18.02 %. Menurunnya kontribusi PAD terhadap penerimaan kabupaten/kota mengindikasikan bahwa penurunan terhadap ketergantungan pembiayaan investasi/pembangunan dari pusat belum nampak, bahkan ada kecenderungan yang sebaliknya yaitu semakin besar ketergantungan pada sumber pembiayaan investasi/pembangunan dari pusat yang berupa dana perimbangan.

Dana perimbangan khususnya DBH dan DAK secara nasional belum memberikan peranan yang besar sebagai sumber pembiayaan investasi daerah. Hal ini disebabkan karena sistem bagi hasil (DBH) dan proses serta formula perhitungan DAK tergolong relatif kompleks (SMERU, 2007)

Sistem bagi hasil berdasarkan pada daerah penghasil menyebabkan hanya beberapa daerah saja yang diuntungkan yaitu daerah yang kaya sumber daya alam dan daerah-daerah yang memiliki potensi pajak daerah yang tinggi. Sesuai dengan penelitian Joko (2007) bahwa daerah-daerah kaya dengan sumber daya alam seperti Riau, Kalimantan Timur, Aceh dan Irian Jaya akan mendapatkan dana bagi hasil sumber daya alam yang relatif lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah yang

miskin sumber daya alam. Di sisi lain untuk daerah-daerah pusat perekonomian/pusat bisnis seperti Jakarta dan kota-kota metropolitan lainnya akan menerima dana bagi hasil pajak (PBB, BPHTB, dan PPh) yang cukup besar.

Penetapan jumlah DAK dan alokasinya kepada daerah merupakan hasil keputusan antara Panitia Anggaran DPR dengan Pemerintah yang terdiri dari unsur Depkeu, Depdagri, Bappenas, dan departemen teknis yang bidang tugasnya menerima. Meskipun mekanisme penetapan DAK melibatkan beberapa lembaga, keputusan akhir mengenai total jumlah DAK dan alokasinya per bidang maupun per daerah menjadi wewenang Menteri Keuangan setelah berkonsultasi dengan DPR. Peran lembaga lainnya hanya sebagai fasilitator. Departemen teknis, misalnya, hanya berperan dalam memberikan data teknis tiap daerah sesuai dengan bidang tugasnya (Poesoro, 2007).

Penelitian yang dilakukan SMERU (2007) bahwa regulasi DAK yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sering kali terlambat dan tidak cocok dengan jadwal perencanaan dan penganggaran di daerah. Ketika isi regulasi pusat yang terbit terlambat itu ternyata berbeda dengan apa yang diperkirakan daerah sewaktu menyusun APBD, beberapa hal dalam APBD terpaksa harus diubah dan dimusyawarahkan lagi dengan DPRD. Proses seperti ini, selain menyita waktu aparat pemerintah daerah, juga menghabiskan cukup banyak dana, padahal kemampuan keuangan daerah pada umumnya terbatas.

Pada awal otonomi daerah dicanangkan oleh pemerintah, fenomena yang terjadi adalah sebagian besar pemerintah daerah berlomba-lomba untuk menciptakan pungutan baru dalam bentuk pajak dan retribusi daerah dengan dalih demi meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Meskipun kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah diatur dalam UU, ternyata telah memperburuk iklim penanaman modal swasta di Indonesia. Penelitian yang dilakukan Ray (2003) menunjukkan sisi gelap otonomi daerah terhadap perkembangan penanaman modal swasta di daerah. Penelitian terhadap 23 kabupaten/kota di Indonesia dengan responden 1014 pengusaha kecil, menengah, dan besar menunjukkan bahwa belum ada perbaikan iklim usaha di daerah yang signifikan sejak diberlakukannya otonomi

daerah. Faktor lain yang dinilai turut menghambat iklim penanaman modal swasta adalah masih rendahnya pelayanan publik, kurangnya kepastian hukum, dan berbagai peraturan daerah (Perda) yang tidak mendukung penanaman modal. Pelayanan publik yang dikeluhkan terutama terkait dengan ketidakpastian biaya dan lamanya waktu berurusan dengan perijinan dan birokrasi. Hal ini diperparah dengan masih berlanjutnya berbagai pungutan, baik resmi maupun liar yang harus dibayar para pengusaha kepada para petugas, pejabat dan para oknum yang menyalahgunakan jabatannya. (Mudrajad, 2004).

Dari model yang telah diestimasi, untuk variable POP menunjukkan bahwa variable tersebut mempunyai hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk konteks Indonesia jumlah penduduk yang besar dan pertumbuhan yang tinggi, disatu sisi merupakan anugerah dan di sisi lain adalah masalah. Penduduk yang banyak berarti tersedianya pasar yang besar serta *suplly* tenaga kerja yang melimpah, tetapi lapangan kerja yang tersedia tidak cukup mampu menampung peningkatan jumlah angkatan kerja yang terus bertambah setiap tahunnya. Akibatnya adalah angka pengangguran terus meningkat, sehingga membebani perekonomian. Hal ini sesuai dengan teori dari Robert Malthus bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat akan menurunkan tingkat pendapatan perkapita.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa selama periode 2002 – 2006 :

1. Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan investasi daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota. Namun pengaruhnya relatif kecil – seperti yang ditunjukkan dari kecilnya nilai koefisien variabel PAD terhadap pertumbuhan PDRB kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan bahwa di era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, PAD memang masih belum dapat diandalkan sebagai sumber pembiayaan investasi daerah. Kondisi yang demikian ini berkaitan dengan beberapa permasalahan di antaranya relatif rendahnya basis pajak dan retribusi daerah, kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah, kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang masih rendah.
2. Dana perimbangan khususnya dana bagi hasil dan dana alokasi khusus sebagai sumber pembiayaan investasi daerah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota. Namun, pengaruhnya relatif kecil – seperti yang ditunjukkan dari kecilnya nilai koefisien variabel DBHDAK terhadap pertumbuhan PDRB kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan bahwa pada era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal alokasi DBH & DAK yang dijadikan sumber pembiayaan investasi daerah masih rendah.
3. Penanaman modal swasta mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap terhadap pertumbuhan PDRB kabupaten/kota pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota. Namun begitu, besaran pengaruhnya relatif kecil – seperti yang ditunjukkan dari kecilnya nilai koefisien variabel PMS terhadap pertumbuhan

PDRB kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan bahwa akumulasi modal yang didapat dari penanaman modal swasta baik melalui PMDN maupun PMA masih kecil.

4. Terdapat perbedaan karakteristik perekonomian antar daerah berdasarkan letak geografis dan status administrasi, yaitu :
 - a. Kabupaten/kota yang berada di propinsi Jawa-Bali rata-rata mempunyai pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota di luar propinsi Jawa-Bali ;
 - b. Daerah perkotaan rata-rata mempunyai pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan daerah Kabupaten ;

Hal ini mengindikasikan bahwa akumulasi modal baik dari pemerintah daerah yang bersangkutan (PAD), pemerintah pusat (DBH&DAK) maupun dari pihak swasta (PMA &PMDN) lebih banyak terjadi pada daerah yang memiliki pusat-pusat perekonomian dan daerah yang memiliki kondisi infrastruktur yang lebih baik.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan diatas, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dari hasil pembahasan jelas adanya pengaruh antara investasi daerah dengan pertumbuhan ekonomi meskipun besaran pengaruhnya relatif kecil. Karena itu persoalan yang muncul adalah bagaimana memperbesar pengaruh tersebut. Memperbesar pengaruh dapat dilaksanakan melalui akumulasi modal baik yang berasal dari pemerintah maupun swasta, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa berkelanjutan dalam jangka panjang :
 - a. Peningkatan akumulasi modal pemerintah daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan meningkatkan pengawasan;

- b. Peningkatan akumulasi modal dari pemerintah pusat antara lain dilaksanakan melalui peningkatan alokasi DBH dan DAK yang dibarengi dengan perbaikan regulasi sehingga semakin banyak daerah yang mampu memanfaatkan dana ini dengan optimal;
 - c. Peningkatan akumulasi modal swasta dilaksanakan dengan meningkatkan iklim penanaman modal swasta melalui berbagai upaya berkesinambungan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan para pelaku ekonomi di daerah. Upaya awal yang paling mendasar yang perlu segera dilakukan oleh pemerintah daerah adalah perlunya menyederhanakan birokrasi perijinan investasi, menjamin adanya kepastian hukum yang didukung dengan jaminan keamanan dan stabilitas politik, membangun kesiapan sumber daya manusia yang terampil dan cekatan, dan penyediaan fasilitas infrastruktur, serta pemberian berbagai insentif kepada para investor, misalnya dalam bentuk *tax holiday* ;
2. Untuk memperbaiki hasil penelitian, periode penelitian perlu ditambah. Dengan demikian temuan yang diperoleh bisa saja berbeda. Data dalam penelitian ini adalah data periode tahun 2002 – 2006, sehingga belum tentu bisa memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Bagaimanapun dampak dari kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal akan lebih nyata apabila menggunakan data yang lebih lama.
 3. Berkaitan dengan variabel independent, maka perlu dilakukan dengan variabel lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu variabel pendapatan perkapita atau variabel jumlah penduduk yang produktif/angkatan kerja .

Lampiran 1

Daftar Nama dan Kode Kabupaten/Kota

NO	KOTA	Kode	NO	KOTA	Kode
1	Kab. Aceh Barat	1	41	Kab. Tanah Datar	41
2	Kab. Aceh Besar	2	42	Kota Bukit Tinggi	42
3	Kab. Aceh Selatan	3	43	Kota Padang Panjang	43
4	Kab. Aceh Singkil	4	44	Kota Padang	44
5	Kab. Aceh Tengah	5	45	Kota Payakumbuh	45
6	Kab. Aceh Tenggara	6	46	Kota Sawah Lunto	46
7	Kab. Aceh Timur	7	47	Kota Solok	47
8	Kab. Aceh Utara	8	48	Kab. Bengkalis	48
9	Kab. Bireuen	9	49	Kab. Indragiri Hilir	49
10	Kab. Pidie	10	50	Kab. Indragiri Hulu	50
11	Kab. Simeulue	11	51	Kab. Kampar	51
12	Kota Banda Aceh	12	52	Kab. Karimun	52
13	Kota Sabang	13	53	Kab. Riau Kepulauan	53
14	Kab. Asahan	14	54	Kab. Kuantan Singingi	54
15	Kab. Dairi	15	55	Kab. Natuna	55
16	Kab. Deli Serdang	16	56	Kab. Pelalawan	56
17	Kab. Tanah Karo	17	57	Kab. Rokan Hilir	57
18	Kab. Labuhan Batu	18	58	Kab. Rokan Hulu	58
19	Kab. Langkat	19	59	Kab. Siak	59
20	Kab. Mandailing Natal	20	60	Kota Batam	60
21	Kab. Nias	21	61	Kota Dumai	61
22	Kab. Simalungun	22	62	Kota Pekanbaru	62
23	Kab. Tapanuli Selatan	23	63	Kab. Batang hari	63
24	Kab. Tapanuli Tengah	24	64	Kab. Bungo	64
25	Kab. Tapanuli Utara	25	65	Kab. Kerinci	65
26	Kab. Toba Samosir	26	66	Kab. Merangin	66
27	Kota Binjai	27	67	Kab. Muaro Jambi	67
28	Kota Medan	28	68	Kab. Sarolangun	68
29	Kota Pemantang Siantar	29	69	Kab. Tj. Jabung Barat	69
30	Kota Sibolga	30	70	Kab. Tj. Jabung Timur	70
31	Kota Tanjung Balai	31	71	Kab. Tebo	71
32	Kota Tebing Tinggi	32	72	Kota Jambi	72
33	Kab. Lima Puluh Koto	33	73	Kab. Lahat	73
34	Kab. Agam	34	74	Kab. Musi Banyuasin	74
35	Kab. Kep. Mentawai	35	75	Kab. Musi Rawas	75
36	Kab. Padang Pariaman	36	76	Kab. Muara Enim	76
37	Kab. Pasaman	37	77	Kab. Ogan Komering ilir	77
38	Kab. Pesisir Selatan	38	78	Kab. Ogan Komering ulu	78
39	Kab Swh Luntosijunjung	39	79	Kota Palembang	79
40	Kab. Solok	40	80	Kab. Bengkulu Selatan	80

Daftar Nama dan Kode Kabupaten/Kota

NO	KOTA	Kode	NO	KOTA	Kode
81	Kab. Bengkulu Utara	81	121	Kab. Boyolali	121
82	Kab. Rejang Lebong	82	122	Kab. Brebes	122
83	Kota Bengkulu	83	123	Kab. Cilacap	123
84	Kab. Lampung Barat	84	124	Kab. Demak	124
85	Kab. Lampung Selatan	85	125	Kab. Grobongan	125
86	Kab. Lampung Tengah	86	126	Kab. Jepara	126
87	Kab. Lampung Utara	87	127	Kab. Karanganyar	127
88	Kab. Lampung Timur	88	128	Kab. Kebumen	128
89	Kab. Tanggamus	89	129	Kab. Kendal	129
90	Kab. Tulang Bawang	90	130	Kab. Klaten	130
91	Kab. Way Kanan	91	131	Kab. Kudus	131
92	Kota Bandar Lampung	92	132	Kab. Magelang	132
93	Kota Metro	93	133	Kab. Pati	133
94	Propinsi DKI Jakarta	94	134	Kab. Pekalongan	134
95	Kab. Bandung	95	135	Kab. Pemasang	135
96	Kab. Bekasi	96	136	Kab. Purbalingga	136
97	Kab. Bogor	97	137	Kab. Purworejo	137
98	Kab. Ciamis	98	138	Kab. Rembang	138
99	Kab. Cianjur	99	139	Kab. Semarang	139
100	Kab. Cirebon	100	140	Kab. Seragen	140
101	Kab. Garut	101	141	Kab. Sukoharjo	141
102	Kab. Indramayu	102	142	Kab. Tegal	142
103	Kab. Karawang	103	143	Kab. Temanggung	143
104	Kab. Kuningan	104	144	Kab. Wonogiri	144
105	Kab. Majalengka	105	145	Kab. Wonosobo	145
106	Kab. Purwakarta	106	146	Kota Magelang	146
107	Kab. Subang	107	147	kota Pekalongan	147
108	Kab. Sukabumi	108	148	Kota Salatiga	148
109	Kab. Sumedang	109	149	Kota Semarang	149
110	Kab. Tasikmalaya	110	150	Kota Surakarta	150
111	Kota Bandung	111	151	Kota Tegal	151
112	Kota Bekasi	112	152	Kab. Bantul	152
113	Kota Bogor	113	153	kab. Gunung Kidul	153
114	Kota Cirebon	114	154	Kab. Kulon Progo	154
115	Kota Depok	115	155	Kab. Sleman	155
116	Kota Sukabumi	116	156	Kota Yogyakarta	156
117	Kab. Banjarnegara	117	157	Kab. Bangkalan	157
118	Kab. Banyumas	118	158	Kab. Banyuwangi	158
119	Kab. Batang	119	159	Kab. Blitar	159
120	Kab. Blora	120	160	Kab. Bojonegoro	160

.Daftar Nama dan Kode Kabupaten/Kota

NO	KOTA	Kode	NO	KOTA	Kode
161	Kab. Bondowoso	161	201	Kab. Sintang	201
162	kab. Gresik	162	202	Kota Pontianak	202
163	Kab. Jember	163	203	Kab. Barito Selatan	203
164	Kab. Jombang	164	204	Kab. Barito Utara	204
165	Kab. Kediri	165	205	Kab. Kapuas	205
166	Kab. Lamongan	166	206	Kab. Kotawaringin Barat	206
167	Kab. Lumajang	167	207	Kab. Kotawaringin Timur	207
168	Kab. Madiun	168	208	Kota Palangkaraya	208
169	Kab. Magetan	169	209	Kab. Banjar	209
170	Kab. Malang	170	210	Kab. Barito Kuala	210
171	kab. Mojokerto	171	211	Kab. Hulu Sungai Selatan	211
172	Kab. Nganjuk	172	212	Kab. Hulu Sungai Tengah	212
173	Kab. Ngawi	173	213	Kab. Hulu Sungai Utara	213
174	Kab. Pacitan	174	214	Kab. Kota Baru	214
175	Kab. Pamekasan	175	215	Kab. Tabalong	215
176	kab. Pasuruan	176	216	Kab. Tanah Laut	216
177	kab. Ponorogo	177	217	Kab. Tapin	217
178	Kab. Probolinggo	178	218	Kota Banjarbaru	218
179	Kab. Sampang	179	219	Kota Banjarmasin	219
180	Kab. Sidoarjo	180	220	Kab. Berau	220
181	Kab. Situbondo	181	221	Kab. Bulungan	221
182	kab. Sumenep	182	222	Kab. Kutai	222
183	Kab. Trenggalek	183	223	Kab. Kutai Barat	223
184	Kab. Tuban	184	224	Kab. Kutai Timur	224
185	kab. Tulungagung	185	225	Kab. Malinau	225
186	Kab. Blitar	186	226	Kab. Nunukan	226
187	Kota Kediri	187	227	Kab. Pasir	227
188	Kota Madiun	188	228	Kota Balikpapan	228
189	Kota Malang	189	229	Kota Bontang	229
190	Kota Mojokerto	190	230	Kota Samarinda	230
191	Kota Pasuruan	191	231	Kota Tarakan	231
192	Kota Probolinggo	192	232	Kab. Bolaang Mongondow	232
193	Kota Surabaya	193	233	Kab. Minahasa	233
194	Kab. Bengkayang	194	234	Kab. Sangihe Talaud	234
195	Kab. Landak	195	235	Kota Bitung	235
196	Kab. Kapuas Hulu	196	236	Kota Manado	236
197	Kab. Ketapang	197	237	Kab. Banggai	237
198	Kab. Pontianak	198	238	Kab. Banggai Kepulauan	238
199	Kab. Sambas	199	239	Kab. Buol	239
200	Kab. Sanggau	200	240	Kab. Toli Toli	240

Daftar Nama dan Kode Kabupaten/Kota

NO	KOTA	Kode	NO	KOTA	Kode
241	Kab. Dongala	241	281	Kab. Tabanan	281
242	Kab. Morowali	242	282	Kota Denpasar	282
243	Kota Poso	243	283	Kab. Bima	283
244	Kota Palu	244	284	Kab. Dompu	284
245	Kab. Bantaeng	245	285	Kab. Lombok Barat	285
246	Kab. Barru	246	286	Kab. Lombok Tengah	286
247	Kab. Bone	247	287	Kab. Lombok Timur	287
248	Kab. Bulukumba	248	288	Kab. Sumbawa	288
249	Kab. Enrekang	249	289	Kota Mataram	289
250	Kab. Gowa	250	290	Kab. Alor	290
251	Kab. Jenepono	251	291	Kab. Belu	291
252	Kab. Luwu	252	292	Kab. Ende	292
253	Kab. Luwu Utara	253	293	Kab. Flores Timur	293
254	Kab. Majene	254	294	Kab. Kupang	294
255	Kab. Mamuju	255	295	Kab. Lembata	295
256	Kab. Maros	256	296	Kab. Manggarai	296
257	kab. Pangkep	257	297	Kab. Ngada	297
258	Kab. Pinrang	258	298	Kab. Sikka	298
259	kab. Polmas	259	299	Kab. Sumba Barat	299
260	Kab. Selayar	260	300	Kab. Sumba Timur	300
261	Kab. Sidrap	261	301	Kab. Timor Tengah Selatan	301
262	Kab. Sinjai	262	302	Kab. Timor Tengah Utara	302
263	Kab. Soppeng	263	303	Kota Kupang	303
264	Kab. Takalar	264	304	Kab. Maluku Tenggara Barat	304
265	Kab. Tana Toraja	265	305	Kab. Maluku Tengah	305
266	Kab. Wajo	266	306	Kab. Maluku Tenggara	306
267	Kota Pare- Pare	267	307	kab. Pulau Buru	307
268	Kota Makasar	268	308	Kota Ambon	308
269	Kab. Buton	269	309	Kab. Biak Numfor	309
270	Kab. Kendari	270	310	Kab. Fak Fak	310
271	Kab. Kolaka	271	311	Kab. Jayapura	311
272	kab. Muna	272	312	Kab. Jayawijaya	312
273	Kota Kendari	273	313	Kab. Manokwari	313
274	Kab. Badung	274	314	Kab. Merauke	314
275	Kab. Bangli	275	315	Kab. Mimika	315
276	Kab. Buleleng	276	316	Kab. Nabire	316
277	Kab. Gianyar	277	317	Kab. Paniai	317
278	Kab. Jembrana	278	318	Kab. Puncak Jaya	318
279	Kab. Karangasem	279	319	Kab. Sorong	319
280	Kab. Klungkung	280	320	Kab. Yapen Waropen	320

Daftar Nama dan Kode Kabupaten/Kota

NO	KOTA	Kode
321	Kota Jayapura	321
322	Kota Sorong	322
323	Kab. Halmahera Tengah	323
324	Kab. Maluku Utara	324
325	Kota Ternate	325
326	Kab. Lebak	326
327	kab. Pandegelang	327
328	Kab. Serang	328
329	Kab. Tangerang	329
330	Kota Cilegon	330
331	Kota Tangerang	331
332	Kab. Bangka	332
333	Kab. Belitung	333
334	Kota Pangkal Pinang	334
335	Kab. Boalemo	335
336	Kab. Gorontalo	336
337	Kota Gorontalo	337

Lampiran 2

Hasil Estimasi dengan Metode Efek Tetap :

$$\ln \text{PDRB} = \beta_0 + \beta_1 \ln \text{PAD} + \beta_2 \ln \text{DBHDAK} + \beta_3 \ln \text{PMS} + \beta_4 \ln \text{POP} + \epsilon$$

Dependent Variable: LPDRB?

Method: Pooled Least Squares

Date: 01/10/00 Time: 01:00

Sample: 2002 2006

Included observations: 5

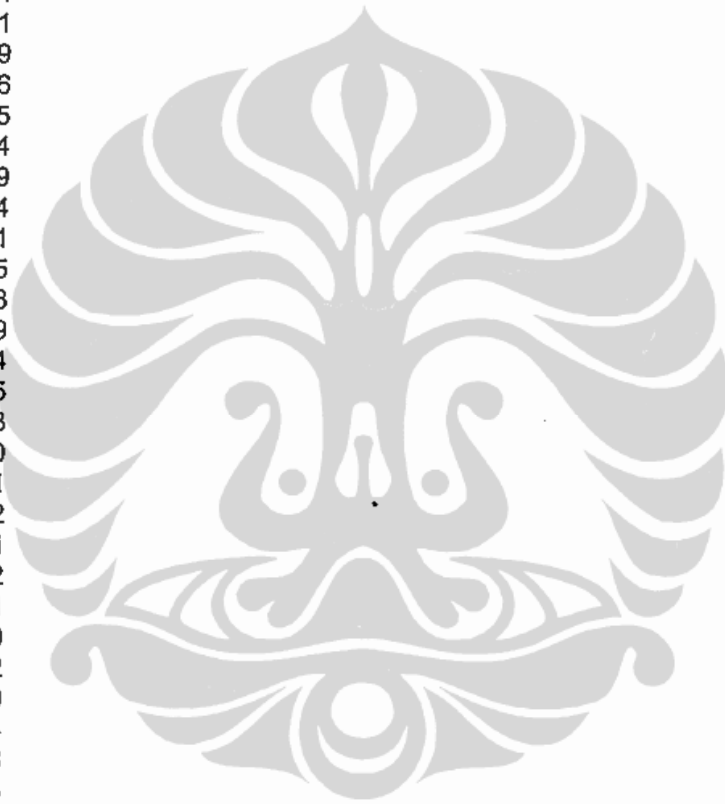
Total panel observations 456

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

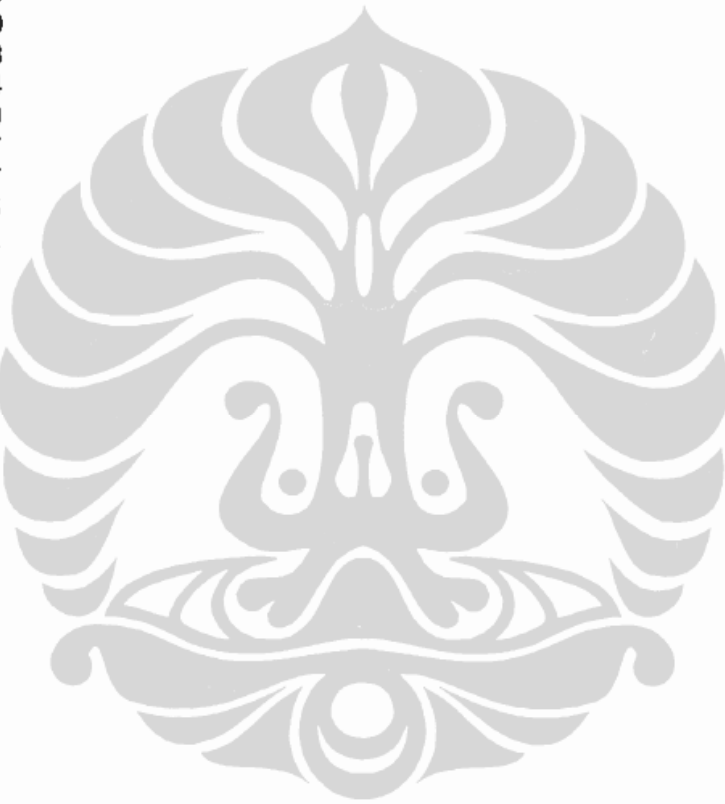
Cross sections without valid observations dropped

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LPAD?	0.058993	0.017642	3.343870	0.0009
LDBHDAK?	0.130733	0.010437	12.52540	0.0000
LPMS?	0.004996	0.001628	3.068720	0.0022
LPOP?	-0.075467	0.029928	-2.521627	0.0119
Fixed Effects				
18-C	14.69294			
22-C	14.25871			
23-C	13.94542			
24-C	12.71400			
25-C	13.54792			
26-C	13.58995			
27-C	13.13847			
28-C	15.74890			
34-C	13.62211			
35-C	11.85560			
36-C	13.76509			
37-C	13.88507			
38-C	13.26749			
39-C	13.42166			
40-C	13.47768			
44-C	14.88780			
47-C	11.87646			
49-C	14.12455			
50-C	13.59332			
54-C	13.36556			
57-C	13.43371			
58-C	13.19106			
59-C	13.25273			
60-C	15.49772			
61-C	12.77009			
62-C	14.18570			
64-C	12.58898			
66-C	12.52381			
68-C	12.54732			
69-C	13.07596			

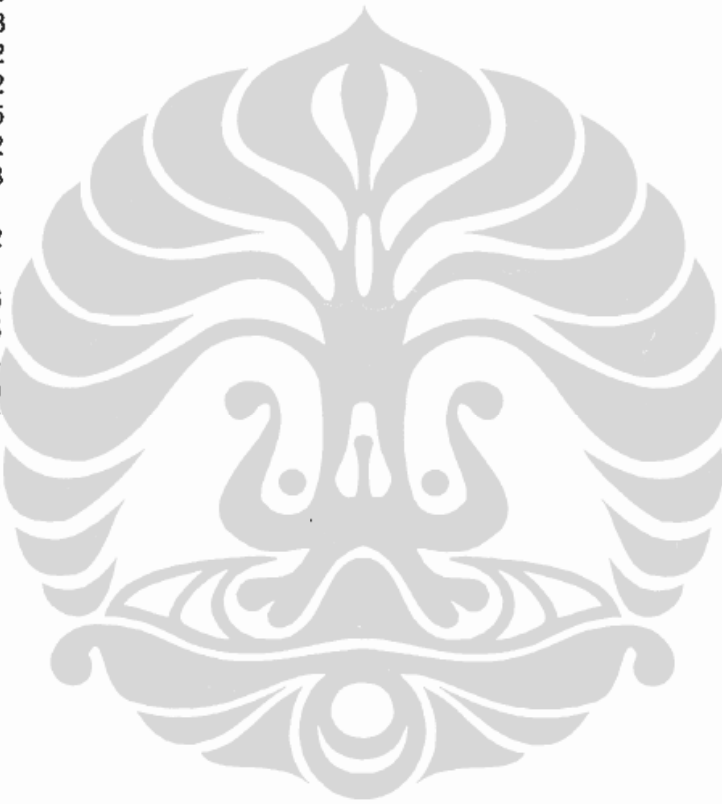
71-C	12.30625
72-C	13.58081
73-C	13.76984
74-C	14.34278
75-C	13.57247
76-C	14.13387
77-C	14.08282
79-C	14.98590
80-C	12.64761
81-C	13.11277
83-C	13.28844
85-C	14.21102
86-C	14.37354
87-C	13.71131
88-C	13.87689
89-C	13.88946
90-C	14.13925
92-C	14.26974
94-C	16.06849
95-C	15.98014
96-C	16.19931
97-C	15.80685
98-C	14.62838
99-C	14.67369
100-C	14.54154
102-C	14.41755
103-C	15.20293
104-C	13.95810
105-C	13.97621
106-C	14.44362
107-C	14.33781
108-C	14.73112
109-C	14.24761
111-C	15.44760
112-C	14.95532
115-C	14.18030
116-C	13.00244
118-C	14.07718
120-C	13.33713
121-C	14.09543
122-C	14.28850
123-C	15.10844
124-C	13.76026
126-C	14.08905
127-C	14.22228
128-C	13.38894
129-C	14.31264
134-C	13.77541
136-C	13.50869
137-C	13.69112
138-C	13.43726
139-C	14.31857
140-C	13.64071
143-C	13.51602
144-C	13.61724
146-C	12.58933



149--C	15.33561
150--C	13.92057
152--C	13.97043
154--C	12.99400
156--C	14.12621
157--C	13.32435
158--C	14.74910
160--C	13.98840
161--C	13.09877
162--C	15.01500
164--C	14.34474
166--C	14.13456
169--C	13.65370
171--C	14.31720
172--C	14.07718
173--C	13.55324
174--C	12.74799
175--C	13.13647
176--C	14.25667
177--C	13.72215
179--C	13.40102
180--C	15.68379
183--C	13.44222
184--C	14.31272
185--C	14.60206
186--C	12.33247
187--C	15.76561
190--C	12.85542
192--C	13.16420
194--C	12.64713
195--C	12.69320
196--C	12.56723
197--C	13.44054
198--C	14.42947
199--C	13.59640
200--C	13.74798
201--C	13.08806
202--C	14.39899
203--C	12.94154
204--C	13.29503
205--C	13.85599
206--C	13.77947
207--C	14.13265
208--C	12.93110
209--C	13.56978
210--C	13.19504
212--C	12.44617
213--C	13.16133
214--C	14.30669
215--C	13.12185
216--C	13.13781
218--C	12.29440
219--C	13.88193
220--C	13.43815
221--C	12.32411
222--C	14.15030



223--C	13.20635
226--C	12.20353
227--C	13.73382
228--C	14.38704
229--C	13.21668
230--C	14.56390
232--C	13.46261
233--C	14.41980
234--C	12.80197
235--C	13.25698
236--C	14.07001
237--C	13.08745
242--C	12.80500
244--C	13.43678
246--C	12.17972
247--C	13.62722
248--C	13.00515
250--C	13.07202
251--C	12.47938
252--C	13.40971
253--C	14.25962
256--C	12.63151
257--C	13.33176
260--C	11.65035
262--C	12.53974
264--C	12.30670
265--C	12.81447
266--C	13.26406
267--C	12.06314
268--C	14.91264
269--C	13.19462
270--C	13.15229
271--C	13.83552
274--C	14.00244
276--C	13.75062
277--C	13.60355
278--C	13.11512
279--C	13.13118
280--C	12.79451
281--C	13.30576
282--C	14.06852
284--C	12.51650
285--C	13.34535
286--C	13.32285
288--C	14.41467
289--C	13.12193
290--C	11.57911
291--C	12.31160
293--C	12.18910
294--C	12.70451
295--C	10.69214
296--C	12.92310
300--C	12.20119
302--C	11.83892
303--C	13.25060
305--C	12.62356



306-C	11.91207
307-C	11.30661
308-C	13.09695
309-C	12.58092
311-C	12.73241
314-C	12.96926
316-C	12.45033
325-C	11.89135
326-C	13.99926
328-C	14.78539
329-C	15.30668
330-C	14.78105
331-C	15.61419
332-C	14.45425
333-C	13.09464
334-C	12.81183
337-C	11.92425

R-squared	0.998200	Mean dependent var	14.90271
Adjusted R-squared	0.996543	S.D. dependent var	0.992643
S.E. of regression	0.058360	Sum squared resid	0.807184
F-statistic	43799.56	Durbin-Watson stat	1.920445
Prob(F-statistic)	0.000000		

Daftar Pustaka

- Bahl, Roy W, 2000, *Cina : Evaluasi Dampak Reformasi Fiskal Intrapemerintah*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bambang Susiyati, 2007, *Desentralisasi Sebagai Upaya Meningkatkan Penyediaan Layanan Publik (Bagi Orang Miskin) di Indonesia*, Pidato pada Upacara Pengukuhan sebagai Gurubesar Tetap dalam bidang Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta 24 Februari 2007
- Bird, R. M and F Vaillantcourt, Fiscal, 2000 , *Desentralisasi Fiskal di Negara-Negara Berkembang*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiono. 2002 “ *Kebijakan Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Rangka Pelaksanaan Azas Desentralisasi Fiskal,*” disampaikan pada Rapat Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara Tingkat Nasional Tahun 2002, Jakarta, 11 Februari
- Davoodi, Hamid and Heng Fu-Zou , 1998, *Fiscal Decentralization and Economic Growth : A Cross-Country Study*, Journal of Urban Economic 43.244-257
- Davoodi, Hamid, Danyang Xie and Heng-fu Zou ,1995, *Fiscal Decentralization and Economic Growth in the United States*, Policy Research Department (Washington DC : World Bank)
- Delima Puspa, 2000, *Dampak Ekonomi dan Politik UU No.22 dan 25 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah*, Economic Working Paper Series. www.CSIS.or.id/paper/wpe054.
- Endi, Rober 2008, *Isu-Isu Otda Januari-April 2008*, KPPOD News Edisi Januari-April 2008
- Facchini, Giovanni and Cecilia Testa, 2006, *Fiscal Decentralization, regional inequality and bail-outs : Lesson from Brazil's debt crisis*, The Quarterly Review of Economics and Finance.
- Gujarati, Damodar N (1995), *Basic Econometrics*, (New York : Mc Growhill)
- Hidayat, Syarif, 2002, *Refleksi Realitas Otonomi Daerah*, Jakarta : Pustaka Quantum Jakarta.
- Fu Zaou Heng and Tao Zang,1997, *Fiscal Decentralization, public spending, and economic growth in China*, Journal of Urban Economic 67 (1998) 221-240

- Ismali, Tjip, 2002, *Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*, Forum Inovasi dan Kepemerintahan yang Baik PPs PSIA-FISIP UI, Vol.4 September – November 2002.
- Makmun, 2004, *Potret Perekonomian Daerah Sebelum dan Era Desentralisasi Fiskal*, Badan Analisa Fiskal Departemen Keuangan.
- Mankiw, N Gregory, 2006, *Pengantar Ekonomi Makro, edisi 3*, Jakarta : Penerbit Salembaempat.
- Mardiasmo.a, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, ANDI, Yogyakarta.
- Mardiasmo.b, 2002, *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*, Jurnal Ekonomi Rakyat, Artikel-THI No.4 Juni 2002. WWW.ekonomirakyat.org/edisi_4/Artikel_3.htm.
- Maurung dan Rahardja (2001) , *Teori Ekonomi Makro*, Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Musgrave, R. A and Musgrave, P.B, (1991). "*Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*" (Jakarta : Penerbit Erlangga)
- Murwito, Sigit, 2008, *Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pembangunan Ekonomi Berbasis Wilayah*, KPPOD News Edisi Januari-April 2008
- Nachrowi, D Nachrowi dan Hardius Usman, 2006, *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika, Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*, Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah"
- Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah"
- Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah"